

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN

2018-2022



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
PROVINSI JAWA BARAT
MENURUT PENGELUARAN**

2018-2022



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN 2018-2022

ISSN : 2655-0350
Nomor Publikasi : 32000.2315
Katalog : 9302020.32

Ukuran Buku : 17,6 x 25 cm
Jumlah Halaman : xvi + 136 halaman

Naskah:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Penyunting:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Gambar Kover:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Ilustrasi Foto:
Koleksi Humas BPS Provinsi Jawa Barat

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dicetak Oleh:
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial
tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN 2018-2022

Tim Penyusun:

Pengarah	: Marsudijono, S.Si, MM
Koordinator Teknis	: Samiran, S.Si, MT
Naskah dan Pengolah Data	: Vira Wahyuningrum, SST, M.Stat Yuni Anggorowati, SST, MAP Siswanita U., S.Si, MT Yayuf Faridah Ibrahim, S.Si, ME Luthfi Fajar Arifah, S.Tr.Stat
Editor	: Samiran, S.Si, MT Rendra Kurniawan, SST, MM Asnafiya Asrof, SST, M.Stat
Gambar Kover	: Singgah Satrio Prayogo, S.Kom
<i>Lay out</i> & Infografis	: Vira Wahyuningrum, SST, M.Stat

KATA PENGANTAR

PDRB merupakan salah satu data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sampai saat ini, penghitungan PDRB dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu sisi produksi (*production*) dan sisi pengeluaran (*expenditure*), baik untuk periode tahunan maupun triwulanan. Pendekatan *production* menjelaskan agregat PDRB yang terkait dengan penciptaan nilai tambah yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha. Sedangkan pendekatan *expenditure* menjelaskan pengeluaran pendapatan baik untuk aktivitas konsumsi akhir dan investasi riil.

Publikasi “Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran 2018-2022” ini menyajikan data dan informasi PDRB dari sisi pengeluaran untuk periode tahun 2018–2022 atas harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010 dan sudah disesuaikan dengan *System of National Account* 2008 (SNA 2008) yang di rekomendasikan oleh *United Nations*.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penerbitan publikasi ini, semoga memberikan banyak manfaat bagi semua pengguna. Saran dan tanggapan sangat diharapkan agar publikasi ini dapat disajikan dengan lebih baik pada edisi yang akan datang.

Bandung, April 2023
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat



Marsudijono, S.Si, MM

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xi
Daftar Lampiran	xii
Ringkasan Eksekutif	xiii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Pengertian Pendapatan Regional	3
1.2 Kegunaan Statistik Pendapatan Regional	7
Bab II Metode Estimasi dan Sumber Data	9
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	11
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	14
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	17
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	20
2.5 Perubahan Inventori	26
2.6 Ekspor Impor	30
Bab III Tinjauan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Berdasarkan PDRB Pengeluaran Tahun 2018-2022	33
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Provinsi Jawa Barat Menurut Pengeluaran	37
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	47
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	57
3.4 Perkembangan Konsumsi Akhir Pemerintah	61
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	68
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	75
3.7 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa	79
3.8 Perkembangan Impor Barang dan Jasa	83

	Hal
Bab IV Perkembangan Agregat PDDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022	89
4.1 Perkembangan PDRB Menurut Pengeluaran 2018-2022	92
4.2 Perbandingan Penggunaan PDRB untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor	96
4.3 Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	99
4.4 Proporsi Konsumsi Akhir terhadap PDRB	101
4.5 Perbandingan Ekspor terhadap PMTB	103
4.6 Perbandingan PDRB terhadap Impor	106
4.7 Keseimbangan Total Penyediaan dan Total Permintaan	108
4.8 Neraca Perdagangan (<i>Trade Balance</i>)	110
4.9 Rasio Perdagangan Internasional (RPI)	113
4.10 <i>Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR)</i>	115
Bab V Penutup	121
Lampiran	125

DAFTAR TABEL

	Hal.	
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (miliar rupiah)	38
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat 2018-2022 (miliar rupiah)	40
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	42
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	44
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	46
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	48
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	52
Tabel 8	Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	53
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	56
Tabel 10	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi LNPRT Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	58
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	65
Tabel 12	Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	68
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	72
Tabel 14	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	76

	Hal.	
Tabel 15	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	82
Tabel 16	Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	84
Tabel 17	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	94
Tabel 18	Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2018-2022	97
Tabel 19	Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2018-2022	100
Tabel 20	Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	102
Tabel 21	Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	104
Tabel 22	Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	107
Tabel 23	Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	109
Tabel 24	Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	111
Tabel 25	Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	114
Tabel 26	<i>Incremental Capital Value Added Ratio</i> (ICVAR) Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	117

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1 Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (triliun rupiah)	41
Gambar 2 Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2022	112

<https://jabar.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal.	
Tabel 1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (juta rupiah)	127
Tabel 2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (juta rupiah)	128
Tabel 3	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	129
Tabel 4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	130
Tabel 5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	131
Tabel 6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	132
Tabel 7	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	133
Tabel 8	Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	134
Tabel 9	Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022	135
Tabel 10	Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)	136

RINGKASAN EKSEKUTIF

Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2022 telah pulih, dengan pertumbuhan ekonomi meningkat 5,45 persen. Proses pemulihan telah dimulai pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 3,74 persen, jika dibandingkan dengan pola laju pertumbuhan ekonomi nasional, pemulihan di Jawa Barat lebih baik dengan laju pertumbuhan melebihi Nasional (3,70 persen). Kinerja perekonomian Jawa Barat pada tahun 2022 juga lebih tinggi dibanding laju pertumbuhan nasional yang sebesar 5,31 persen, bahkan tercatat sebagai yang tertinggi di pulau Jawa. Sampai dengan tahun 2019 laju pertumbuhan Jawa Barat selalu di atas nasional, namun di tahun 2020 perekonomian Jawa Barat terkontraksi lebih dalam daripada nasional. Laju pertumbuhan Jawa Barat terkontraksi 2,44 persen sedangkan nasional terkontraksi 2,07 persen. Dalam kondisi normal secara rata-rata nasional, perekonomian Jawa Barat mempunyai kinerja yang lebih baik, terbukti dengan laju pemulihan yang lebih tinggi, meskipun saat terjadi pandemi Jawa Barat terdampak lebih berat.

Kondisi perbaikan ini ditandai dengan konsumsi yang berangsur pulih, konsumsi masyarakat meningkat signifikan, juga total ekspor dengan pertumbuhan signifikan. Beberapa komponen telah melebihi nilai di tahun 2019, pemulihan sudah mulai tampak di tahun 2021 dan terus berlanjut di tahun 2022. Laju pertumbuhan *year on year* melebihi nasional terlihat pada triwulan IV 2021, terus berlanjut sampai dengan triwulan III 2022. Indikasi penguatan permintaan akhir telah terlihat nyata meskipun masih terjadi perlambatan, namun ini mengindikasikan optimisme menuju pemulihan.

Konsumsi rumah tangga pada tahun 2022 meningkat sebesar 4,57 persen, mengalami akselerasi dibanding tahun 2021. Nilai konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima, semakin besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga maka akan semakin besar pula nilai konsumsinya. Demikian pula sebaliknya, ketika pendapatan berkurang akibat pengurangan jam kerja atau pemutusan hubungan kerja atau karena tidak lagi bekerja maka pendapatan akan menurun bahkan menjadi tidak ada, sehingga mempengaruhi nilai konsumsi rumah tangga. Ketika kondisi perekonomian mulai membaik, akan seiring dengan membaiknya tingkat

pendapatan masyarakat yang kemudian meningkatkan daya beli. Tekanan inflasi juga menjadi salah satu penghambat daya beli.

Indikator perbaikan pemulihan ekonomi terlihat pada kondisi ketenagakerjaan dan kemiskinan yang semakin membaik. Pada tahun 2020 (Agustus), kondisi pandemi menyebabkan jumlah angkatan kerja yang terdampak sebanyak 6,36 juta orang, dan pada tahun 2021 (Agustus) menurun sebanyak 1,73 juta orang, menjadi 4,63 juta orang. Jumlah angkatan kerja terdampak pandemi *Covid* kembali menurun signifikan pada tahun 2022 menjadi sebanyak 1,02 juta orang. Angkatan kerja yang terdampak pandemi terdiri dari pengangguran karena *Covid*, bukan angkatan kerja karena *Covid*, sementara tidak bekerja karena *Covid*, dan bekerja karena pengurangan jam kerja karena *Covid*. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2022 sebesar 8,31 persen, turun sebesar 1,51 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 9,82 persen. Di sisi lain, persentase penduduk miskin pada September 2022 sebesar 7,98 persen, menurun 0,08 persen poin terhadap Maret 2022 dan naik 0,01 persen poin terhadap September 2021.

Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPR) juga mengalami akselerasi pertumbuhan sebesar 3,13 persen setelah sebelumnya tumbuh sebesar 1,92 persen. Sebagaimana diketahui, sumber utama pendanaan lembaga ini adalah rumah tangga, lembaga nonpemerintah dan pengusaha, sehingga saat kondisi telah berangsur pulih maka pertumbuhan konsumsi LNPR akan seiring dengan laju konsumsi rumah tangga. Pelonggaran pemberlakuan aturan pembatasan kegiatan masyarakat secara menyeluruh hingga secara proporsional memberi pengaruh pula pada meningkatnya aktivitas LNPR. Konsumsi LNPR dipengaruhi oleh aktivitas sosial masyarakat, aktivitas keagamaan, aktivitas politik, aktivitas budaya dan lain sebagainya, termasuk aktivitas perlindungan sosial. Kejadian bencana alam sepanjang tahun 2022 di Jawa Barat merupakan yang terbanyak, yakni 818 kejadian (BNPB), salah satunya adalah bencana gempa Cianjur pada tanggal 21 November 2022.

Belanja pemerintah di tahun 2022 difokuskan pada akselerasi penanganan dampak *Covid-19* dan pemulihan ekonomi dengan belanja yang bersifat produktif, oleh karena itu belanja bantuan sosial telah berkurang secara proporsional dan beralih pada belanja yang bersifat produktif. Pengalihan belanja konsumsi ke belanja produktif berpengaruh pada laju pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) yang secara total menurun 1,72

persen. Penurunan terjadi pada kedua fungsi, baik fungsi kolektif maupun individu. Menurunnya anggaran bantuan sosial sebesar 12,4 persen (Kemensos) menjadi salah satu penyebab menurunnya PKP. Penurunan juga terjadi pada penurunan belanja pegawai yang bersumber dari APBN, hal ini terkait dengan penurunan jumlah pegawai serta mulai beralihnya pola penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara berangsur beralih ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada tahun 2022 aktivitas investasi regional Jawa Barat tumbuh melambat 0,29 persen, setelah pada tahun sebelumnya meningkat signifikan 6,47 persen. PMTB terdiri dari dua jenis yaitu bangunan dan non bangunan, aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2021 meningkat signifikan pada kinerja PMTB Bangunan yang meningkat sebesar 6,47 persen, dan pada tahun 2022 PMTB bangunan mengalami penurunan sebesar 2,21 persen. Aktivitas pembelian barang modal non bangunan tahun 2022 juga mengalami peningkatan signifikan sebesar 9,91 persen.

Di tahun 2022, komponen perdagangan luar negeri dan luar wilayah tumbuh positif meskipun melambat jika dibanding tahun 2021. Realisasi nilai ekspor luar negeri Jawa Barat tahun 2022 tumbuh sebesar 12,42 persen dibanding nilai ekspor tahun 2020. Sementara realisasi nilai impor luar negeri Jawa Barat tahun 2022 tumbuh sebesar 14,15 persen dibanding nilai impor tahun 2021. Secara agregat, total ekspor Jawa Barat tahun 2022 tumbuh sebesar 11,10 persen sedangkan total impor Jawa Barat tumbuh 8,92 persen. Jawa barat merupakan provinsi dengan tumpuan perekonomian industri pengolahan dan peranan investasi asing terbesar di Indonesia, sehingga perekonomian Jawa Barat sangat terpengaruh oleh kondisi perekonomian global. Industri besar di Jawa Barat sebagian besar berorientasi ekspor, dan mengandalkan bahan baku serta barang modal impor. Kinerja komponen impor barang dan jasa meningkat signifikan pada tahun 2021 dan terus berlanjut di tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya permintaan luar negeri maupun permintaan domestik luar provinsi. Kondisi geopolitik perang Rusia-Ukraina tentunya berdampak pada kinerja ekspor dan impor Jawa Barat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Besarnya peranan impor yang tinggi di satu sisi, bagi Jawa Barat menggerakkan aktivitas ekonomi di sisi *supply* karena mayoritas menggunakan bahan baku impor, tetapi di sisi lain menggambarkan ketergantungan yang besar terhadap produk luar wilayah Jawa Barat. Kebijakan pemerintah untuk

aktivitas impor harus diarahkan untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan bahan baku impor agar tidak menjadi pengurang bagi daya saing perekonomian wilayah.

<https://jabar.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

<https://jabaapps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. PENGERTIAN PENDAPATAN REGIONAL

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk domestik Regional Bruto (PDRB) adalah ukuran moneter nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan pada periode waktu tertentu. PDRB nominal bisa menggambarkan ekonomi suatu wilayah dan bisa dibandingkan secara nasional di pasar internasional. *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) mendefinisikan PDB/PDRB sebagai ukuran agregat produksi yang sama dengan jumlah nilai kotor yang ditambahkan dari semua unit penduduk dan institusi yang terlibat dalam produksi dan jasa (ditambah pajak dikurangi subsidi). Dengan demikian PDB/PDRB adalah alat untuk mengukur nilai moneter akhir barang dan jasa yang dibeli oleh pengguna akhir dan diproduksi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

Berdasarkan SNA 2008, pengertian PDB/PDRB merupakan konsep nilai tambah yang diperoleh dari selisih antara output dengan konsumsi antara yaitu jumlah nilai tambah bruto seluruh unit produsen residen ditambah pajak atas produk kurang subsidi atas produk yang tidak termasuk di dalam penilaian output. Di sisi lain, konsep PDB/PDRB merupakan jumlah konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi nilai impor barang dan jasa. Dengan demikian PDB/PDRB

merupakan jumlah pendapatan primer yang didistribusikan oleh unit produsen residen.

Produk Domestik Neto (PDN/PDRN) diperoleh dengan mengurangi PDB/PDRB dengan konsumsi barang modal tetap. Namun ukuran bruto (*gross*) dari produk dan pendapatan akan digunakan dengan berbagai alasan. Penyusutan aset tetap seperti yang dihitung pada akuntansi bisnis, secara umum tidak memenuhi syarat SNA. Penghitungan konsumsi barang modal tetap membutuhkan statistik dalam mengestimasi nilai stok aset tetap, usia berbagai jenis aset, pola penyusutan dan lain-lain. Tidak seluruh negara/wilayah menyusun penghitungan seperti itu, dan bila mereka melakukan mungkin berbeda metodologi (dengan menggunakan data bisnis meskipun kurang tepat). Akibatnya nilai bruto lebih sering muncul atau tersedia lebih dulu, dan secara umum lebih dapat diperbandingkan antar negara. Sehingga PDB/PDRB secara luas digunakan, meskipun menurut konsep dasar ekonomi manfaatnya lebih rendah dari PDN/PDRN. PDN/PDRN juga harus dihitung dengan mengembangkan estimasi konsumsi barang modal tetap agar dapat menjadi alat yang bermakna dalam berbagai jenis analisis.

Pendapatan primer yang tercipta dari aktivitas produksi oleh unit produsen residen, sebagian besar didistribusikan ke unit institusi residen lainnya; sedangkan sebagian lagi dapat didistribusikan ke unit nonresiden. Demikian halnya beberapa pendapatan primer yang tercipta di luar negeri, mungkin berasal dari unit residen. Hal itu mengarah pada pendefinisian dan pengukuran Pendapatan Nasional/Regional Bruto (PNB/PRB). PNB/PRB sama dengan PDB dikurangi pendapatan primer yang dibayar ke unit nonresiden, ditambah dengan pendapatan primer yang diterima dari unit nonresiden. Dengan kata lain, PNB/PRB sama dengan PDB dikurangi pajak

(kurang subsidi) atas produksi dan impor, kompensasi tenaga kerja, serta pendapatan kepemilikan yang dibayarkan ke luar negeri; ditambah pendapatan kepemilikan yang diterima dari luar negeri. Dengan demikian, PNB adalah jumlah pendapatan primer bruto yang diterima oleh unit institusi residen atau sektor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pendekatan untuk mengetahui pendapatan regional. Pendapatan regional adalah Produk Regional Neto yaitu merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh residen yang tinggal di suatu daerah pada periode tertentu (www.bps.go.id). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta perubahan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit

produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu: 1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, 2) Pertambangan dan Penggalian, 3) Industri Pengolahan, 4) Pengadaan Listrik dan Gas, 5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6) Konstruksi, 7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 8) Transportasi dan Pergudangan, 9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, 10) Informasi dan Komunikasi, 11) Jasa Keuangan dan Asuransi, 12) Real Estat, 13) Jasa Perusahaan, 14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, 15) Jasa Pendidikan, 16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan 17) Jasa lainnya. Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi subkategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri atas: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2) pengeluaran konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan inventori, dan (6) ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PENDAPATAN REGIONAL

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian regional setiap tahun, dalam pembahasan ini menggunakan pendekatan data PDRB. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap lapangan usaha dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut kategori lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori lapangan usaha ekonomi dalam suatu wilayah. Lapangan usaha yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri maupun luar wilayah.

5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai lapangan usaha ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi dan perdagangan luar negeri serta luar wilayah.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

<https://jabar.bps.go.id>

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://jabarhps.id>



BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi adalah:

- Makanan dan minuman baik bahan maupun makanan jadi, termasuk minuman beralkohol, rokok, dan tembakau;
- Perumahan dan fasilitasnya, seperti biaya sewa/kontrak rumah, bahan bakar, rekening telepon, listrik, air, biaya pemeliharaan dan perbaikan rumah, termasuk imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

- Bahan pakaian, pakaian jadi, alas kaki, dan penutup kepala;
- Barang tahan lama seperti mobil, meubeler, perabot dapur, TV, perhiasan, alat olah raga, binatang peliharaan, dan tanaman hias;
- Barang lain, seperti bahan kebersihan (sabun mandi, sampo, dan sejenisnya), bahan kecantikan (kosmetik, bedak, lipstik, dan sejenisnya), obat-obatan, vitamin, buku, alat tulis, surat kabar;
- Jasa-jasa, seperti kesehatan (biaya rumah sakit, dokter, imunisasi, dan sejenisnya), pendidikan (biaya sekolah, kursus, dan sejenisnya), ongkos transportasi, perbaikan kendaraan, biaya hotel, dan ongkos pembantu rumah tangga;
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen luar wilayah atau luar negeri termasuk dalam konsumsi rumah tangga dan diperlakukan sebagai impor. Sedangkan pembelian langsung oleh nonresiden diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut (UN, 1993).

Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga. Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah. Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan
- Jumlah penduduk pertengahan tahun
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

Selama ini, penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Namun, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Sektor Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya di bawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

LNPRT merupakan bagian dari lembaga nonprofit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga. Karakteristik unit LNP adalah sebagai berikut :

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan

pengurus;

- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, Organisasi profesi, perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output nonpasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output nonpasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor, dan lain-lain.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN, dan lain-lain.

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PK-LNPRT tahunan adalah sebagai berikut:

- Hasil Survei Khusus Lembaga Nonprofit (SK-LNP).
- Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
- Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} x_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT ADH berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara men-*deflate* PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi nonpasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen,

pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang dan jasa maupun aktivitas investasi.

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PKP mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dan sebagainya. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan nonkomoditas (pendapatan jasa).

Komponen pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP) Provinsi mencakup : a). PK Pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah provinsi; b). PK Pemerintah provinsi yang bersangkutan; c). PK Pemerintah pusat yang merupakan bagian dari pemerintah provinsi; d). PK Pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi bersangkutan.

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PKP provinsi tahunan adalah:

- a) Data realisasi APBN tahunan (Kemenkeu)
- b) Data realisasi APBD tahunan (Kemenkeu)
- c) Statistik keuangan daerah (BPS)
- d) Output Bank Indonesia (BI)
- e) Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta indeks harga dari BPS.

Secara umum, PKP ADH berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PKP ADH Berlaku} = \text{Output nonpasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **nonpasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam

bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PKP provinsi ADH berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan kabupaten/kota yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah pusat yang menjadi bagian dari provinsi yang bersangkutan.

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADH konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

PMTB menggambarkan penambahan dan pengurangan barang modal yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

Secara umum, barang modal dapat diklasifikasikan menurut 4 (empat) golongan, yaitu : menurut jenis barang modal, lapangan usaha, institusi, dan wilayah asal. Dalam kerangka penyusunan PDRB, PMTB dirinci menurut jenis barang modal, yaitu:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin dan perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya

(*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;

2. Biaya alih kepemilikan aset nonfinansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan PMTB tahunan antara lain:

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil dan Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan nonmigas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas dan Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan langsung adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan tidak langsung adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan arus komoditas. Dalam hal ini penyediaan atau *supply* dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

❖ Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (ADH) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai ADH berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB ADH konstan, maka PMTB ADH berlaku tersebut di *deflate* (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

❖ Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik ADH berlaku maupun ADH konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasi output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB ADH berlaku. Untuk memperoleh nilai ADH konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (ADH berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara ekstrapolasi atau mengalikan PMTB ADH konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB ADH konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB ADH berlaku, nilai PMTB ADH konstan tersebut di-*reflate* (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB ADH konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara. *Pertama*, PMTB ADH berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB ADH konstan adalah dengan cara men *deflate* PMTB ADH berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB ADH berlaku untuk barang modal tak-berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan ADH berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB ADH konstannya diperoleh dengan men-deflate nilai ADH berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunan-nya.

Untuk perangkat lunak, PMTB ADH berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk ADH konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai ADH berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB ADH

konstannya diperoleh dengan cara men-*deflate* nilai ADH berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak-langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini

adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

Pada prinsipnya, inventori merupakan persediaan bahan baku, barang setengah jadi maupun barang jadi yang dikuasai oleh berbagai pelaku ekonomi. Barang-barang inventori ini akan digunakan lebih lanjut dalam proses produksi sebagai input antara atau untuk dijual tanpa mengalami proses lebih lanjut. Klasifikasi inventori dalam keperluan penghitungan

perubahan inventori dapat dibedakan atas:

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku dan penolong (*material dan supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalan;

- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi korporasi, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi komoditas.

Dilihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

❖ Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori ADH berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut.

- Menghitung posisi inventori ADH konstan, dengan cara men-*deflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori ADH konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya;
- Menghitung perubahan inventori ADH berlaku dengan meng*inflate* perubahan inventori ADH konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

❖ Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori ADH berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori ADH konstan dihitung dengan: a. men-*deflate* nilai perubahan inventori ADH berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara me-*mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6. EKSPOR IMPOR

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah.

Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan nonresiden yang berada di luar wilayah tersebut.

Ekspor-impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut.
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net ekspor antar daerah yang terdiri dari ekspor antar daerah dan impor antar daerah.

Sumber data yang digunakan dalam penghitungan Ekspor-impor tahunan adalah sebagai berikut:

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)

- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang.

Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Di samping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun nonresiden. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

*TINJAUAN PEREKONOMIAN
PROVINSI JAWA BARAT
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
TAHUN 2018 - 2022*

http://jabar.scribd.id



BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2018 – 2022

Mengawali tahun 2022, kondisi global telah mengalami pemulihan meskipun di awal tahun terkendala *Omicron*. Hal tersebut diperkuat dengan seiring semakin meluasnya program vaksin dan peningkatan sistem pelayanan kesehatan serta program pemulihan ekonomi nasional yang mulai menampakkan hasilnya. Kondisi geopolitik Rusia-Ukraina sedikit banyak mempengaruhi rantai pasok dunia yang berimbas pada inflasi komoditi tertentu. Melonjaknya biaya logistik dan inflasi di negara mitra dagang Jawa Barat menyebabkan lemahnya permintaan beberapa komoditi seperti garmen (dikutip dari jabar.antaranews.com, 30 Oktober 2022).

Mobilitas penduduk yang semakin leluasa dengan melonggarnya aturan PPKM mendorong aktifitas ekonomi masyarakat. Faktor-faktor lain yang juga menjadi pendorong aktifitas ekonomi adalah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang telah mencapai 100 persen, tempat rekreasi dan restoran juga telah diijinkan beroperasi secara penuh, diijinkannya kembali perjalanan umroh dan haji serta dibukanya aktivitas penerbangan internasional.

Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penanganan *Covid-19* menjadi kunci utama percepatan pemulihan ekonomi Jawa Barat. Minat investasi yang masih cukup tinggi di Jawa Barat juga menjadi mesin penggerak dalam pemulihan ekonomi, pembangunan infrastruktur yang terus berjalan menjadi *booster* bagi ekonomi secara keseluruhan. Meskipun

hantaman inflasi komoditas *volatile* maupun *administered price*, namun perekonomian Jawa Barat masih mampu berkinerja dengan baik. Geliat perekonomian Jawa Barat hampir mencapai akselerasi pada masa sebelum pandemi.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Jawa Barat pada tahun 2022 mengalami kejadian terbanyak bencana alam, yang paling parah adalah gempa Cianjur, meskipun demikian geliat pemulihan perekonomian menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi positif terjadi di setiap triwulan selama tahun 2022. Pertumbuhan pada setiap komponen dipengaruhi oleh siklus pola permintaan domestik maupun luar wilayah. Tekanan inflasi sepanjang tahun 2022, menahan laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga, namun berbagai skenario kebijakan pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat cukup berhasil sehingga pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumahtangga mengalami akselerasi. Situasi geopolitik internasional mempengaruhi perdagangan dunia, meskipun ekspor dan impor masih tumbuh positif namun terjadi perlambatan.

Pemulihan perekonomian Provinsi Jawa Barat semakin membaik, bahkan melebihi akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun pada tahun 2020 berkontraksi lebih dalam dibanding nasional namun dapat pulih lebih cepat pada tahun 2021 dan semakin cepat di tahun 2022. Bahkan pada tahun 2022, laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tertinggi di antara provinsi-provinsi di pulau Jawa.

3.1. TINJAUAN AGREGAT PDRB PROVINSI JAWA BARAT MENURUT PENGELUARAN

Skenario pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat pada tahun 2021, cukup berhasil dalam pemulihan perekonomian. Pada tahun 2022 belanja pemerintah untuk penanganan dampak *Covid-19* pada tahap lanjutan, dengan fokus utama anggaran kesehatan, meskipun dengan jumlah yang mulai berkurang seiring dengan membaiknya kondisi Kesehatan masyarakat pasca pandemi. Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural. Upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat cukup besar, terutama dalam meredam dampak inflasi melalui kebijakan keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan.

Indikasi pemulihan terlihat dari meningkatnya nominal komponen PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Nilai nominal seluruh komponen PDRB Pengeluaran ADHB tahun 2022 telah melebihi nilai nominal pada tahun 2019. Namun nilai nominal ADHB masih mengandung dampak inflasi. Sebagaimana diketahui situasi geopolitik dunia mempengaruhi harga bahan bakar dunia, yang berdampak pada peningkatan harga kargo dan transportasi dunia. Perekonomian Jawa Barat memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap situasi perdagangan dunia. Sebagian industri pengolahan di Jawa Barat termasuk Penanaman Modal Asing (PMA), dan berorientasi ekspor. Bahkan hampir 80 persen impor luar negeri Jawa Barat merupakan bahan baku dan barang modal.

Nominal PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran menggambarkan penggunaan akhir seluruh sumber daya yang diciptakan

oleh sumber daya ekonomi dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Setelah terjadi penurunan nilai nominal PDRB atas dasar harga berlaku, pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding nilai tahun 2020 menjadi sebesar 2.204,66 triliun rupiah. Peningkatan masih berlanjut di tahun 2022, dan terjadi di seluruh komponen. Secara total meningkat menjadi sebesar 2.422,78 triliun rupiah. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume. Peningkatan nilai juga mengindikasikan perekonomian secara makro tumbuh, daya beli masyarakat meningkat, serta penguatan daya saing produk barang dan jasa wilayah di pasar nasional dan internasional.

Tabel 1.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2018–2022 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1 278 278,90	1 387 762,27	1 378 904,38	1 424 594,08	1 570 458,02
2. Konsumsi LNPRT	12 753,65	13 629,89	13 340,95	13 760,94	14 720,00
3. Konsumsi Pemerintah	112 935,06	117 448,94	116 666,16	121 635,31	122 545,78
4. PMTB	495 827,14	531 364,62	489 180,23	545 297,64	576 895,25
5. Perubahan Inventori	72 019,60	73 290,76	27 303,94	- 15 151,20	2 492,32
6. Ekspor	859 971,31	943 711,91	914 423,48	1 122 988,05	1 276 342,07
7. Dikurangi Impor	871 157,99	944 054,68	857 711,88	1 008 464,59	1 140 671,12
Total PDRB	1 960 627,65	2 123 153,71	2 082 107,26	2 204 660,23	2 422 782,32

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Konsumsi akhir oleh rumah tangga atau Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PKRT) seringkali menjadi tolok ukur kesejahteraan dan

keberhasilan pembangunan suatu wilayah. PKRT juga menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan menjadi kekuatan tarikan permintaan dalam perekonomian. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) memberikan gambaran peran pemerintah dalam perekonomian, sesuai fungsi baik sebagai penyedia pelayanan kolektif maupun pelayanan individu. Seluruh belanja yang digunakan dalam pelayanan kepada masyarakat merupakan nilai PKP. Investasi yang dijabarkan oleh besaran PMTB dan perubahan inventori, menggambarkan bagaimana penambahan kekuatan perekonomian Jawa Barat berupa kekayaan aset tetap. Daya saing produk domestik juga diperlihatkan oleh besarnya peranan nilai ekspor. Nilai impor merupakan pengurang dalam perekonomian karena bukan merupakan produk dalam wilayah.

Selain dinilai atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau berbagai produk dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan atas dasar harga konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran atas dasar harga konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Selama kurun waktu 2018–2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Jawa Barat berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan dapat dilihat pada Tabel 2. Sama halnya dengan PDRB atas dasar harga berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun selama periode tahun 2018–2019, kemudian menurun pada tahun 2020. Akibat pandemi, nilai PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2020 mengalami pengurangan yang cukup

berarti. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penurunan volume permintaan domestik dan juga penurunan permintaan eksternal. Seiring pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, tahun 2021 PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan kenaikan. Peningkatan masih berlangsung pada tahun 2022, yaitu meningkat menjadi sebesar 1.589,98 triliun rupiah. Kenaikan terbesar terjadi pada seluruh komponen, yang terbesar adalah peningkatan yang terjadi pada komponen total ekspor yaitu menjadi 756,91 triliun rupiah, demikian pula nilai komponen impor yang juga meningkat menjadi 556,71 triliun rupiah. Pada tahun 2022 ini transaksi perdagangan luar wilayah mengalami surplus sebesar 200,20 triliun rupiah.

Tabel 2.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2018–2022 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	878 991,27	920 742,90	894 114,73	905 974,62	948 326,48
2. Konsumsi LNPRT	9 032,68	9 353,99	8 971,94	9 144,60	9 430,85
3. Konsumsi Pemerintah	69 973,15	72 248,44	71 414,93	72 890,11	71 634,01
4. PMTB	352 312,42	366 760,22	336 213,72	357 977,88	359 006,10
5. Perubahan Inventori	43 588,21	43 599,93	16 198,45	- 8 456,84	1 390,51
6. Ekspor	550 805,25	591 685,34	558 716,78	681 316,21	756 908,42
7. Dikurangi Impor	485 078,85	513 431,14	432 249,84	511 100,18	556 711,44
Total PDRB	1 419 624,14	1 490 959,69	1 453 380,72	1 507 746,39	1 589 984,93

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Pada tahun 2022, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) adhk mengalami penurunan nilai, seiring dengan semakin membaiknya kondisi Kesehatan masyarakat akibat pandemi *Covid-19*. Penurunan nilai konstan Komponen PKP pada suatu perekonomian menjadi indikasi semakin membaiknya kemandirian perekonomian suatu wilayah selama pertumbuhan membaik. Jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi *Covid-19* nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tahun 2022 masih lebih rendah daripada nilai tahun 2019. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, meskipun pemulihan ekonomi telah berjalan namun penambahan mesin penggerak perekonomian belum mencapai kondisi normal sebagaimana sebelum pandemi.

Gambar 1.
Perbandingan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018–2022 (triliun rupiah)



Dari gambar di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB atas dasar harga berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku. Dalam PDRB atas

dasar harga konstan pengaruh perubahan harga telah ditiadakan. Sehingga selisih nilai antara atas dasar harga berlaku dengan atas dasar harga konstan merupakan nilai perubahan harga. PDRB menurut pengeluaran merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), konsumsi akhir LNPRT (PKLNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PKP), PMTB, perubahan inventori, serta ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa tahun 2022 terdapat tiga komponen yang mengalami peningkatan peranan. Komponen PKRT mengalami peningkatan peranan menjadi 64,82 persen atau naik sebesar 0,20 poin. Beberapa proyek-proyek pembangunan yang sempat terhenti di tahun 2020 akibat pandemi, mulai dilanjutkan kembali di tahun 2021 dan diselesaikan pada tahun 2022. Hal yang sama juga terjadi pada peranan ekspor yang naik sebesar 1,74 poin menjadi 52,68 persen dan peranan impor juga mengalami kenaikan sebesar 1,34 poin menjadi 47,08 persen.

Tabel 3.
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	65,20	65,36	66,23	64,62	64,82
2. Konsumsi LNPRT	0,65	0,64	0,64	0,62	0,61
3. Konsumsi Pemerintah	5,76	5,53	5,60	5,52	5,06
4. PMTB	25,29	25,03	23,49	24,73	23,81
5. Perubahan Inventori	3,67	3,45	1,31	-0,69	0,10
6. Ekspor	43,86	44,45	43,92	50,94	52,68
7. Dikurangi Impor	44,43	44,46	41,19	45,74	47,08
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Pada tahun 2022 peranan PMTB mengalami penurunan 1,08 poin dari tahun 2021. Konsumsi pemerintah juga mengalami penurunan peranan menjadi 5,06 persen. Di masa pandemi pemerintah melakukan *refocusing* anggaran untuk menangani dampak yang lebih berat dan kebijakan pemulihan ekonomi. Hal ini menunjukkan peran pemerintah cukup kuat dalam upaya meredam dampak pandemi yang lebih buruk dan berupaya memulihkan perekonomian, dan pada tahun 2022 fokus belanja pemerintah dalam hal penanganan pandemi *Covid-19* berkurang seiring dengan kondisi kesehatan masyarakat yang telah membaik.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dari tahun 2018 sampai dengan 2019 secara rata-rata di atas 5 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,65 persen pada tahun 2018 serta melambat pada 2019 menjadi 5,02 persen. Kondisi perlambatan ini berlanjut menjadi penurunan laju pertumbuhan sebesar -2,52 persen dengan merebaknya pandemi *Covid-19* pada tahun 2020. Memasuki tahun kedua pandemi, di tahun 2021 secara perlahan perekonomian mulai pulih yang ditunjukkan dengan laju pertumbuhan positif sebesar 3,74 persen. Akselerasi pemulihan ekonomi semakin tinggi pada tahun 2022, seiring dengan aktivitas masyarakat yang telah kembali normal. Keberhasilan program vaksin menjadi pendorong kembalinya aktivitas masyarakat. Tentunya aktivitas perekonomian pun berangsur kembali normal, pembelajaran tatap muka telah diselenggarakan 100 persen, transportasi umum, tempat wisata telah diijinkan beroperasi penuh, demikian halnya hotel dan restoran.

Tabel 4.
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,03	4,75	-2,89	1,33	4,67
2. Konsumsi LNPRT	15,15	3,56	-4,08	1,92	3,13
3. Konsumsi Pemerintah	1,97	3,25	-1,15	2,07	-1,72
4. PMTB	5,88	4,10	-8,33	6,47	0,29
5. Perubahan Inventori	2,25	0,03	-62,85	-152,21	116,44
6. Ekspor	11,52	7,42	-5,57	21,94	11,10
7. Impor	10,49	5,84	-15,81	18,24	8,92
Total PDRB	5,65	5,02	-2,52	3,74	5,45

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Tanda perbaikan ekonomi yang terjadi di 2022 terlihat pada pertumbuhan positif di semua komponen pengeluaran, kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah. PKRT telah mencapai akselerasi mendekati kondisi normal, yakni 4,67 persen. Sebagai komponen dengan peranan terbesar akselerasi PKRT menjadi tumpuan pertumbuhan agregat ekonomi. Demikian halnya total ekspor pada tahun 2022 tumbuh 11,10 persen meskipun terjadi perlambatan dibanding tahun sebelumnya yang telah tumbuh signifikan. Demikian halnya dengan impor total, laju pertumbuhannya pada tahun 2022 sebesar 8,92 persen tumbuh dari tahun sebelumnya yang sebesar 18,24 persen. Kenaikan ekspor yang signifikan menyebabkan pertumbuhan positif pada net ekspor sebesar 17,61 persen. Sementara itu, komponen PMTB tumbuh sebesar 0,29 persen, di mana pada tahun sebelumnya mengalami pertumbuhan cukup signifikan sebesar 6,47 persen.

Akselerasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi dan konsumsi masyarakat Jawa Barat dan hamper mendekati akselerasi normal. Bantuan sosial pemerintah dari berbagai sumber bantuan cukup baik meredam dampak inflasi yang terjadi di tahun 2022. Inflasi yang terjadi pada tahun 2022 disebabkan oleh meningkatnya harga BBM, beras, bahan makanan, cukai rokok, tarif listrik,

Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) juga mengalami akselerasi seiring dengan PKRT. LNPRT merupakan lembaga yang dibiayai oleh rumahtangga dan untuk melayani rumahtangga, sehingga pola konsumsinya mengikuti pola pertumbuhan PKRT. Pada tahun 2022, wilayah Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan kejadian bencana terbanyak, dan yang terbesar adalah bencana gempa bumi di Cianjur. Aktivitas LNPRT di bidang penanganan bencana mengalami aktivitas yang cukup intens selama terjadinya bencana.

Penurunan laju pertumbuhan tahun 2022 terjadi pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP), yaitu menurun 1,72 persen. Belanja pemerintah pada tahun 2022 difokuskan pada belanja infrastruktur dan mengurangi belanja yang sifatnya konsumsi. Tingginya konsumsi pemerintah selama pandemi merupakan langkah penyelamatan, fokus pada program kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat. Pada tahun 2022 anggaran belanja pemerintah juga difokuskan untuk pemulihan ekonomi dengan program bantuan modal usaha untuk UMKM serta program produktif lainnya, serta melanjutkan kembali proyek infrastruktur yang sempat terhenti selama pandemi *Covid-19*.

Tabel 5.
Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Provinsi Jawa Barat, 2018–2022 (persen)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	145,43	150,72	154,22	157,24	165,60
2. Konsumsi LNPRT	141,19	145,71	148,70	150,48	156,08
3. Konsumsi Pemerintah	161,40	162,56	163,36	166,87	171,07
4. PMTB	140,74	144,88	145,50	152,33	160,69
5. Perubahan Inventori	165,23	168,10	168,56	179,16	179,24
6. Ekspor	156,13	159,50	163,66	164,83	168,63
7. Impor	179,59	183,87	198,43	197,31	204,89
Total PDRB	138,11	142,40	143,26	146,22	152,38

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Sementara itu, indeks implisit (indeks perkembangan) PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Sedangkan perubahan indeks implisit secara total merupakan perubahan secara umum atau menurut berbagai kegiatan ekonomi. Indeks implisit atau dikenal sebagai deflator PDRB menunjukkan pengaruh perubahan harga pada PDRB, pertama dengan menetapkan tahun dasar dan, kedua, dengan membandingkan harga saat ini dengan harga di tahun dasar. Deflator harga PDRB menunjukkan seberapa besar perubahan PDRB bergantung pada perubahan tingkat harga. Ini mengungkapkan sejauh mana perubahan tingkat harga, atau inflasi, dalam perekonomian dengan melacak harga yang dibayarkan oleh sektor usaha, pemerintah, dan konsumen. Tabel 5 menyajikan indeks implisit PDRB tahun 2018–2022 dirinci menurut komponen pengeluaran.

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi rumah tangga sangat dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima, semakin besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga maka akan semakin besar pula nilai konsumsinya. Demikian pula sebaliknya saat kondisi kegiatan ekonomi terkendala bahkan terhenti maka akan terjadi pengurangan jam kerja bahkan penghentian hubungan kerja. Hal ini tentu saja langsung berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga. Rumah tangga sebagai pemilik faktor produksi memperoleh pendapatannya dari kegiatan ekonomi yang dilakukannya, sehingga saat kondisi perekonomian menurun maka pendapatan juga akan menurun. Permintaan akhir secara keseluruhan juga dapat memberikan dampak tarikan terhadap aktivitas ekonomi, turunnya permintaan terhadap barang dan jasa akan diikuti oleh penurunan produksi.

Titik balik pemulihan ekonomi telah dimulai pada triwulan II tahun 2021, pertumbuhan positif terus terjadi sampai dengan akhir periode tahun 2022. Keberhasilan program vaksin dan *booster*, dan berbagai program perlindungan sosial dan penanganan bidang kesehatan cukup berhasil. Seiring dengan pelonggaran aturan PPKM, aktivitas ekonomi berangsur pulih, pembelajaran tatap muka juga telah dibuka sepenuhnya, juga aktivitas ekonomi lainnya. Aktivitas perekonomian mulai pulih meskipun belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi *Covid-19*. Situasi geopolitik dunia sangat mempengaruhi menurunnya perdagangan luar negeri juga mempengaruhi menurunnya permintaan ekspor.

Peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa di wilayah provinsi Jawa Barat adalah untuk konsumsi akhir rumah tangga. Oleh karena itu analisis mengenai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga dalam ekonomi makro merupakan hal yang sangat penting. Saat masa pandemi,

rumah tangga terdampak paling besar, Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk terbesar menerima dampak yang cukup besar. Jawa Barat sebagai wilayah dengan industri yang berorientasi ekspor cukup berat terdampak pandemi. Oleh karena itu fokus program pemerintah adalah dengan mempertahankan daya beli masyarakat, dan pada saat pemulihan program perlindungan sosial mulai berkurang porsinya.

Tabel 6.
Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>miliar rupiah</i>)	1 278 278,9	1 387 762,3	1 378 904,4	1 424 594,1	1 570 458,0
b. ADHK 2010 (<i>miliar rupiah</i>)	878 991,3	920 742,9	894 114,7	905 974,6	948 326,5
Proporsi terhadap PDRB					
(% ADHB)	65,20	65,36	66,23	64,62	64,82
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>ribu rupiah</i>)					
a. ADHB	98 867,17	106 136,73	107 848,72	109 997,33	119 729,87
b. ADHK 2010	67 984,68	70 418,86	69 931,70	69 953,11	72 299,29
Rata-rata konsumsi per kapita/tahun (<i>ribu rupiah</i>)					
a. ADHB	26 256,81	28 139,80	28 633,98	29 203,03	31 786,91
b. ADHK 2010	18 055,15	18 670,00	18 566,96	18 571,75	19 194,64
Pertumbuhan (<i>persen</i>)					
a. Total Konsumsi RT	5,03	4,75	-2,89	1,33	4,67
b. per-RT	3,66	3,58	-0,69	0,03	3,35
c. per kapita	3,63	3,41	-0,55	0,03	3,35
Jumlah penduduk (<i>000 orang</i>)					
	48 683,70	49 316,71	48 156,23	48 782,40	49 405,81

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Jawa Barat merupakan daerah tujuan buruh migran dari berbagai provinsi di Indonesia. Selama masa pandemi sentra industri mengalami

pengurangan jumlah penduduk, bergeser ke wilayah kabupaten/kota sekitar atau ke luar Jawa Barat. Selama kurun waktu 2018-2019 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (atas dasar harga berlaku) maupun riil (atas dasar harga konstan) sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga, hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 6. Bertambahnya jumlah penduduk berpendapatan kelas menengah (*middle class*) menyebabkan terjadinya perbaikan kualitas konsumsi serta merubah perilaku dan kebiasaan konsumsi penduduk secara agregat. Demikian pula saat terjadi pandemi, merubah perilaku konsumsi masyarakat, kembali ke pola pemenuhan konsumsi primer dan secara agregat mengalami penurunan. Penurunan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengindikasikan konsumsi rumah tangga tidak hanya menurun secara kuantitas tapi juga kualitas.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun menurut atas dasar harga berlaku selama periode 2018-2019, tetapi pada tahun 2020 nilainya menurun dan mulai kembali meningkat di tahun 2021 dan terus meningkat di tahun 2022. Sedangkan gambaran konsumsi per rumah tangga atas dasar harga konstan 2010 mempunyai pola yang sama dengan atas dasar harga berlaku, hanya saja secara nilai di tahun 2022 telah melebihi nilai di tahun 2019. Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2018 sampai dengan 2020 rata-rata di atas 65 persen dan semakin tinggi perannya pada tahun 2020 menjadi 66,23 persen, namun pada tahun 2021 peranannya menurun menjadi 64,62 persen, dan pada tahun 2022 peranan PKRT meningkat menjadi 64,82 persen.

Rata-rata konsumsi per rumah tangga per tahun menggambarkan besaran dana yang dihabiskan setiap rumah tangga untuk membiayai

konsumsi anggota rumah tangganya baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Selama periode 2018 sampai dengan 2022. Meningkatnya nilai konsumsi per rumah tangga sejalan dengan semakin bervariasinya jenis barang dan volume yang dikonsumsi terutama konsumsi nonmakanan. Atas dasar harga berlaku peningkatan konsumsi per rumah tangga yang terjadi di tahun 2020 merupakan dampak dari terjadinya inflasi dan menurunnya jumlah rumah tangga yang sebesar 2,20 persen.

Setelah terjadinya penurunan daya beli pada masa pandemi, pada tahun 2021 mulai kembali meningkat meskipun belum mencapai saat kondisi normal, peningkatan daya beli semakin tinggi pada tahun 2022 dan telah mendekati kondisi normal. Aktivitas masyarakat telah berangsur normal sehingga aktivitas ekonomi kembali berjalan seperti sediakala, meskipun di beberapa sektor belum sepenuhnya normal. Laju pertumbuhan rata-rata konsumsi per rumah tangga pada kisaran 3 persen sampai dengan tahun 2019, namun di tahun 2020 menurun menjadi -0,69 persen, dan pada tahun 2021 sedikit meningkat yaitu 0,03 persen, kemudian meningkat signifikan sebesar 3,35 persen pada tahun 2022.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per kapita juga menunjukkan pertumbuhan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, sampai dengan tahun 2019. Dengan demikian, konsumsi rata-rata per kapita selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya, pertumbuhan ini terjadi baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini memberi gambaran bahwa sampai dengan tahun 2019, rata-rata konsumsi setiap penduduk di Provinsi Jawa Barat meningkat, baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per kapita secara nominal atas dasar harga berlaku sebesar

26,26 juta rupiah pada tahun 2018, terus meningkat mencapai 31,79 juta rupiah pada tahun 2022. Sedangkan secara atas dasar harga konstan rata-rata konsumsi per kapita meningkat pada periode 2018-2019, dari 18,05 juta rupiah di tahun 2018 meningkat menjadi 18,67 juta rupiah pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 18,56 juta rupiah dan kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 18,57 juta rupiah, dan pada tahun 2022 menjadi 19,19 persen.

Laju pertumbuhan konsumsi per kapita sejalan dengan laju pertumbuhan konsumsi per rumah tangga, yaitu pada kisaran 3 persen selama periode 2018-2019. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,63 persen. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan konsumsi per kapita sebesar 3,41 persen, melambat dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan konsumsi per kapita pada tahun 2020 menurun sebesar -0,55 persen dan mulai meningkat pada tahun 2021 sebesar 0,03 persen berlanjut meningkat di tahun 2022 sebesar 3,35 persen.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2018 konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,03 persen, dan melambat menjadi 4,75 persen pada tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,89 persen. Konsumsi rumah tangga tahun 2021 mulai mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,33 persen dan mengalami akselerasi pada tahun 2022 meningkat 4,67 persen.

Pada tahun 2020, daya beli masyarakat menurun signifikan, bahkan bisa dikatakan terjadi penurunan kuantitas dan kualitas. Rumah tangga yang tidak mengalami penurunan pendapatan pun melakukan pilihan konsumsi yang lebih sederhana. Pada tahun 2021 daya beli masyarakat mulai pulih meskipun belum mencapai posisi seperti saat sebelum pandemi, pada tahun 2022 laju pertumbuhannya telah mendekati kondisi normal.

Tabel 7.
Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022¹ (persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok selain restoran	42,56	43,30	44,84	45,30	45,98
Pakaian dan Alas Kaki	3,93	3,95	3,79	3,74	3,57
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	10,95	10,55	10,68	10,35	10,12
Kesehatan dan Pendidikan	5,49	5,59	5,91	5,99	5,76
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	25,73	25,39	23,54	23,47	23,62
Hotel dan Restoran	6,06	5,99	5,87	5,83	5,77
Lainnya	5,28	5,22	5,37	5,32	5,17
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 7 menggambarkan struktur pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga, terlihat bahwa secara rata-rata dari tahun 2018 sampai dengan 2022, struktur konsumsi akhir rumah tangga Jawa Barat didominasi oleh konsumsi bukan makanan dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan setiap tahun cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Namun demikian peranannya cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu dari 42,56 persen (2018); 43,30 persen (2019); 44,84 persen (2020); 45,30 persen (2021) dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 45,98 persen. Adapun sebaliknya proporsi nonmakanan terus mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 57,44 persen; 56,70 persen pada tahun 2019; 55,06 persen pada tahun 2020; 54,7

¹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

persen pada tahun 2021, serta pada tahun 2022 sebesar 54,02 persen. Konsumsi makanan, minuman dan rokok tidak termasuk konsumsi makanan jadi dalam bentuk sajian, misalnya makanan jadi di restoran, warung makan dan sejenisnya. Makanan jadi dalam bentuk sajian masuk ke dalam kelompok konsumsi hotel dan restoran.

Tabel 8.
Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	6,33	6,48	0,74	2,14	4,43
Pakaian dan Alas Kaki	4,84	3,73	-7,92	0,55	3,44
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,64	2,07	-0,85	-0,79	4,11
Kesehatan dan Pendidikan	4,10	4,23	1,94	4,62	3,17
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,95	4,16	-8,44	0,80	6,37
Hotel dan Restoran	4,57	5,06	-4,83	0,71	5,01
Lainnya	3,74	2,90	-2,34	0,01	1,84

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok makanan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada periode tahun 2018-2022 pertumbuhan konsumsi makanan, minuman dan rokok cenderung meningkat yaitu meningkat 6,33 persen (2018) dan meningkat 6,48 persen (2019), bahkan pada tahun 2020 pun masih mampu meningkat walaupun melambat yaitu 0,74 persen, pada tahun 2021 meningkat 2,14 persen, dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 4,43 persen. Upaya pemerintah untuk menahan dampak krisis cukup mampu

mempertahankan konsumsi rumah tangga sehingga tidak terkonstraksi lebih dalam. Kebersamaan sosial antar rumah tangga dalam masyarakat juga oleh lembaga-lembaga sosial lainnya bergotong royong dalam menyelamatkan sesama merupakan faktor lain yang berperan dalam meredam dampak pandemi bagi rumah tangga.

Pertumbuhan konsumsi pakaian dan alas kaki selama periode 2018-2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 meningkat 4,84 persen, namun melambat di tahun 2019 menjadi 3,73 persen. Pada tahun 2020 kelompok komoditi ini mengalami penurunan laju yang cukup tajam, yaitu mencapai -7,92 persen, pada tahun 2021 kembali tumbuh sebesar 0,55 persen, selanjutnya pada tahun 2022 meningkat 3,44 persen. Kebutuhan pakaian dan alas kaki merupakan kebutuhan yang sedikit dikesampingkan oleh rumah tangga pada kondisi krisis.

Pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi dan budaya tumbuh stabil, sampai dengan tahun 2019, akan tetapi mengalami penurunan paling dalam pada tahun 2020 mencapai -8,44 persen. Seiring dengan membaiknya kondisi pandemi dan semakin banyaknya masyarakat yang telah divaksin, kelompok pengeluaran ini mengalami pertumbuhan 0,8 persen pada 2021, dan meningkat signifikan pada 2022 saat tidak ada lagi pembatasan aktivitas masyarakat. Dibukanya kembali perjalanan Umroh dan Haji pada tahun 2022 juga menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi pada kelompok komoditi ini. Demikian halnya dengan komoditi hotel dan restoran mengalami penurunan tajam mencapai -4,83 persen, kelompok tersebut terkait dengan kelompok komoditi transportasi, rekreasi dan budaya. Seiring dengan semakin longgarnya kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat dan kondisi pandemi yang semakin membaik pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 meningkat

signifikan mencapai 5,01 persen, hal ini terkait dengan dibukanya kembali obyek wisata serta dibukanya kembali penerbangan internasional, sehingga aktivitas perjalanan pariwisata, umroh dan haji serta bisnis bangkit kembali dan telah menuju normal. Pariwisata sangat terkait dengan konsumsi pada kelompok komoditi hotel dan restoran. Kedua kelompok tersebut merupakan kelompok konsumsi yang bersifat "*leisure*". Hanya konsumsi komunikasi yang mengalami peningkatan baik di tahun 2020 maupun 2021.

Sebagaimana pola pertumbuhan kelompok makanan, minuman dan tembakau, kelompok kesehatan dan pendidikan terus mengalami pertumbuhan positif selama lima tahun terakhir, meskipun pada tahun 2020 mengalami perlambatan dengan tumbuh sebesar 1,94 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 4,23 persen. Pada tahun 2021 kembali meningkat sebesar 4,62 persen dan pada tahun 2022 melambat menjadi sebesar 3,17 persen. Pada tahun 2022 pembelajaran tatap muka telah berlangsung normal sehingga aktivitas jasa pendidikan dan seluruh penunjangnya telah kembali pada aktivitas normal seperti sediakala.

Tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Perubahan tersebut mencakup perubahan harga pada seluruh barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Rincian peningkatan harga pada kelompok makanan sebesar 4,81 persen (2018); 3,74 persen (2019); sebesar 2,13 persen (2020) dan pada tahun 2021 sebesar 2,19 persen. Pada tahun 2022 terjadi inflasi yang cukup tinggi pada kelompok komoditi ini yaitu mencapai 7,15 persen. Di tahun 2018 terjadi perubahan harga bahan makanan, namun pada tahun 2019 harga kembali terkendali dan pada tahun 2020 masih terjadi inflasi yang terkendali dan berlanjut pada tahun 2021. Kenaikan harga beras,

daging ayam, telur, bawang, cabe serta kenaikan cukai rokok menjadi pendorong tingginya inflasi pada tahun 2022. Sementara itu, harga pakaian dan alas kaki cenderung stabil dan terkendali yaitu sebesar 5,07 persen (2018); 5,22 persen (2019); dan 3,54 persen (2020); 1,22 persen pada tahun 2021 dan masih terkendali pada tahun 2022 yaitu sebesar 1,75 persen. Harga produk pakaian dan alas kaki cenderung stabil, karena ketersediaan suplai tidak bersifat musiman, juga karena sifat komoditinya yang tahan lama. Hal yang lebih mempengaruhi harga komoditi ini adalah adanya peningkatan harga produksi karena kenaikan bahan baku atau bahan bakar.

Tabel 9.
Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir
Rumah Tangga Provinsi Jawa Barat, 2018-2022² (persen)

Kelompok Konsumsi	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Makanan, Minuman, dan Rokok	4,81	3,74	2,13	2,19	7,15
Pakaian dan Alas Kaki	5,07	5,22	3,54	1,22	1,75
Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,20	2,42	1,44	0,98	3,53
Kesehatan dan Pendidikan	3,85	6,22	2,96	0,14	2,76
Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3,15	2,84	0,61	2,21	4,31
Hotel dan Restoran	5,10	2,15	2,33	1,85	3,99
Lainnya	3,39	4,43	4,65	2,25	5,26

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

² Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Harga kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah cukup terkendali, pada periode tahun 2018-2021 pada kisaran 1 – 2 persen. Namun pada tahun 2022 terjadi peningkatan sampai 3,53 persen, hal ini seiring dengan peningkatan harga tarif dasar listrik dan harga bahan bakar. Pada periode 2019 – 2021 terjadi anomali inflasi, pada tahun 2021 inflasi kelompok tersebut sangat rendah di bawah 1 persen hanya sebesar 0,98 persen. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok Kesehatan dan Pendidikan pada tahun 2021 inflasi sebesar 0,14 persen. Sebelumnya inflasi kelompok komoditi kesehatan dan pendidikan pada tahun 2019 meningkat sampai sekitar 6,22 persen, di tahun-tahun lainnya hanya pada kisaran 2-3 persen. Pada tahun 2022 terjadi inflasi terutama pada bahan makanan dan rokok, pada kelompok komoditi transportasi juga mengalami kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM. Kebijakan pemerintah untuk meredam dampak inflasi cukup berhasil dengan program pengaturan penerima subsidi agar lebih tepat sasaran.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Institusi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) merupakan lembaga nonpemerintah yang dibiayai secara mandiri oleh masyarakat. Dalam pembahasan global dikenal dengan istilah *civil society*. LNPRT berperan sebagai mitra pemerintah menyediakan jasa sosial kemasyarakatan, sehingga aktivitas ekonominya perlu dihitung. Selain itu, menurut SNA 2008 LNPRT sebagai salah satu pelaku ekonomi sehingga perlu disusun kerangka kerja sektor institusi LNPRT.

Peranan konsumsi akhir LNPRT di dalam PDRB menurut pengeluaran masih sangat minor apabila dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa peranan institusi LNPRT

dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Nilai konsumsi akhir LNPRT atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	12 753,65	13 629,89	13 340,95	13 760,94	14 720,00
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	9 032,68	9 353,99	8 971,94	9 144,60	9 430,85
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	0,65	0,64	0,64	0,62	0,61

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

Peranan konsumsi akhir LNPRT yang sangat minor terlihat pada proporsi konsumsi akhir LNPRT terhadap nilai PDRB yang selalu berada di bawah satu persen setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, peranan konsumsi akhir LNPRT tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,65 persen, sedangkan yang terendah adalah pada tahun 2022 yaitu sebesar 0,61 persen. Di tahun 2019 dan 2020, peranan konsumsi akhir LNPRT sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun. Begitu pula tahun 2021, peranan konsumsi akhir LNPRT kembali menunjukkan penurunan, yaitu menjadi sebesar 0,62 persen terhadap nilai perekonomian Jawa Barat.

Apabila dilihat besaran nilainya, dalam lima tahun terakhir konsumsi akhir LNPRT mengalami fluktuasi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Nilai konsumsi akhir LNPRT salah satunya dipengaruhi oleh aktivitas politik, di mana pengeluaran konsumsi partai politik pada tahun-tahun menjelang adanya Pemilu maupun Pilkada akan

mendongkrak nilai konsumsi akhir LNPRT. Begitu pula dengan banyaknya berbagai kejadian bencana, hal itu dapat pula meningkatkan nilai pengeluaran konsumsi LNPRT karena meningkatnya biaya layanan yang dikeluarkan.

Nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2018 salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan Pemilihan Kepala Daerah, baik pemilihan gubernur maupun bupati/walikota, dan sudah dimulai sejak akhir tahun 2017. Kegiatan persiapan berupa musyawarah-musyawarah daerah (Musda), pemilihan pasangan calon, kesepakatan antar partai pendukung dalam bentuk rapat dan pertemuan telah banyak dilakukan. Pada tahun 2018, Jawa Barat menggelar 17 pemilihan kepala daerah secara serentak, yaitu 1 pemilihan gubernur, 6 pemilihan walikota, dan 10 pemilihan bupati. Tahun 2018 juga merupakan tahun persiapan untuk pelaksanaan pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 17 April 2019. Hal itu menyebabkan kenaikan nilai konsumsi akhir LNPRT pada tahun 2018 cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017. Berbagai kegiatan LNPRT di tahun tersebut menyebabkan konsumsi akhir LNPRT Jawa Barat tahun 2018 mencapai 12.753,65 miliar rupiah.

Pesta demokrasi berupa pemilihan anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah serta pemilihan Presiden Indonesia digelar serentak pada 17 April 2019. Kegiatan persiapan untuk Pilpres dan pemilihan anggota legislatif pusat daerah sudah dilakukan di tahun 2018. Meskipun sejak awal tahun 2019 kegiatan kampanye calon anggota legislatif maupun calon presiden makin gencar dilaksanakan, namun durasinya tidak sepanjang persiapan di tahun 2018. Hal itu menyebabkan peningkatan konsumsi akhir LNPRT di tahun 2019 tidak setinggi peningkatan yang terjadi pada tahun 2018. Nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2019 mencapai

13.629,89 miliar rupiah. Peranan konsumsi akhir LNPRT pun sedikit terkoreksi pada tahun itu menjadi 0,64 persen terhadap nilai PDRB.

Terjadinya pandemi *Covid-19* menyebabkan Pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara menyeluruh hingga secara proporsional memberi pengaruh pula pada aktivitas LNPRT. Seperti halnya penerapan bekerja dan belajar dari rumah, kegiatan beribadah pun dilakukan dari rumah. Perayaan Hari Raya dan hari besar keagamaan di tempat-tempat ibadah dibatasi, bahkan ditiadakan, misalnya pada penyelenggaraan ibadah Shalat Tarawih di Bulan Ramadhan, Shalat Idul Fitri 1442 H, dan kegiatan kebaktian di gereja. Hal ini mengakibatkan kegiatan LNPRT yang bergerak di bidang keagamaan menurun. Demikian pula dengan aktivitas LNPRT di bidang politik, pemilihan Kepala Serentak (Pilkada) yang semula direncanakan digelar pada 23 September 2020 diundur menjadi 9 Desember 2020. Persiapan Pilkada dan kampanye pun lebih banyak dilakukan secara daring atau secara tatap muka dengan pertemuan terbatas dan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kondisi tersebut menyebabkan nilai konsumsi akhir LNPRT di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019. Konsumsi akhir LNPRT di Jawa Barat sepanjang 2020 adalah sebesar 13.340,95 miliar rupiah atau mengalami penurunan sebesar 288,93 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Memasuki tahun 2021, pandemi *Covid-19* belum berakhir dan masih sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi Jawa Barat. Sepanjang tahun 2021, nilai konsumsi akhir LNPRT Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 419,99 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau menjadi sebesar 13.760,94 miliar rupiah. Nilai tersebut telah melampaui nilai konsumsi akhir LNPRT sebelum terjadinya Pandemi *Covid-19*.

Selanjutnya di tahun 2022, nilai konsumsi akhir LNPRT Jawa barat kembali meningkat hingga mencapai 14.720,00 miliar rupiah. Peran institusi LNPRT yang cukup berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian pada saat terjadinya bencana alam. Pada kondisi ini, LNPRT yang banyak mengambil peran antara lain adalah lembaga bantuan kemanusiaan dan LSM. Pada setiap kejadian bencana alam, LNPRT berperan dalam pertolongan pertama dan penanggulangan baik korban maupun dampak lingkungan, sehingga pengeluarannya akan meningkat signifikan. Selama 2022, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat telah terjadi 3.531 bencana di Jawa Barat dan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada November 2022, aktivitas LNPRT meningkat signifikan dalam penanganan korban gempa Cianjur. Selain itu, melonggarnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara umum mendorong normalnya kegiatan LNPRT, termasuk kegiatan keagamaan sehingga menjadi pendorong meningkatnya nilai konsumsi akhir LNPRT Jawa Barat di tahun 2022.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Setelah berjibaku melawan pandemi covid sejak Maret 2020, pemerintah semakin fokus pada akselerasi pemulihan ekonomi yang dikenal dengan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Program tersebut mendorong pemulihan di berbagai sektor dengan tetap mengedepankan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. PEN 2022 dirancang fleksible dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dan disederhanakan menjadi tiga kluster, yaitu Kluster Kesehatan, Kluster Perlindungan Sosial, dan Kluster Penguatan Pemulihan Ekonomi. Pemerintah menjalankan kebijakan *front loading* melalui berbagai program

PEN, sementara kabupaten/kota prioritas pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan penyaluran berbagai perlindungan sosial, seperti PKH, Kartu Sembako dan Kartu Prakerja (pen.kemenkeu.go.id).

Pemerintah juga menjalankan kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) yang dikenal dengan *burden sharing*. Mengutip laman resmi CNN Indonesia, skema *burden sharing* didasarkan pada kelompok penggunaan pembiayaan untuk *public goods/benefit* dan *non-public goods/benefit*. Pembiayaan *public goods* yang menyangkut hajat hidup orang banyak terdiri dari pembiayaan di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sementara, pembiayaan untuk *non-public goods* yang menyangkut upaya pemulihan ekonomi dan dunia usaha terdiri dari pembiayaan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Korporasi non-UMKM, dan *non-public*.

Pemerintah merupakan salah satu institusi yang memiliki peran dalam perekonomian wilayah, baik sebagai pencipta nilai tambah maupun sebagai yang melakukan konsumsi. Peranan pemerintah dalam melakukan konsumsi diantaranya adalah untuk membiayai kebutuhan barang dan jasa dalam menjalankan pemerintahan. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk pegawai, belanja bantuan sosial, serta penyusutan barang modal. Konsumsi pemerintah sama dengan nilai output untuk komoditas nonpasar. Artinya adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melayani masyarakat. Selain nilai output pemerintah nonpasar, ada juga output pemerintah dengan harga pasar. Output pasar tersebut diantaranya adalah retribusi dan penerimaan lain-lain yang sah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berupa penerimaan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran konsumsi LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah untuk ADH Berlaku menunjukkan peningkatan pada periode 2018 – 2022, kecuali pada tahun 2020. Tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah ADH berlaku sebesar 112,94 triliun rupiah. Pada tahun 2022, nilai pengeluaran tersebut mencapai 122,54 triliun rupiah. Dari segi ADH Konstan 2010, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah mengalami peningkatan pada tahun 2018 – 2019. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas sampai dengan tahun 2019. Namun pada tahun 2020 ADH konstan mengalami penurunan akibat realokasi dan *refocusing* anggaran penanganan *Covid*, yang berimbas pada realisasi belanja pemerintah tahun 2020 yang juga mengalami penurunan. Penurunan tersebut terjadi pada belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, meskipun belanja bantuan sosial mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, konsumsi akhir pemerintah menguat namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 71,63 triliun rupiah. Hal ini sejalan dengan penurunan APBN untuk belanja pegawai dan belanja modal.

Jika dicermati lebih lanjut, proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami penurunan secara berturut-turut selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 peranannya sebesar 5,60 persen, kemudian menurun pada tahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut masing-masing menjadi 5,52 persen dan 5,06 persen. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2020 belanja pemerintah difokuskan pada

anggaran kesehatan, bantuan dan perlindungan sosial serta pemulihan ekonomi akibat pandemi *Covid*. Sementara di tahun 2021 dan 2022 saat kondisi membaik anggaran pemerintah mulai beralih kepada pembangunan infrastruktur yang sempat terhenti di tahun 2020.

Pengeluaran konsumsi pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Peningkatan pelayanan pemerintah di provinsi Jawa Barat kepada masyarakat dapat diamati dari peningkatan konsumsi pemerintah per kapita ADH berlaku di mana selama periode 2018-2021 terjadi peningkatan pada rata-rata konsumsi per kapita. Konsumsi pemerintah per kapita ADH Berlaku pada tahun 2018 sebesar 2,32 juta rupiah, terus meningkat sampai dengan tahun 2021 mencapai 2,49 juta rupiah. Pada tahun 2022, rata-rata konsumsi per kapita sedikit menurun menjadi 2,48 juta rupiah (lihat Tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per kapita ADH Konstan (2010) menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya selama periode tahun 2018-2021 (lihat Tabel 11). Hal tersebut dapat dilihat dari laju pertumbuhannya, pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per kapita meningkat 1,04 persen, kemudian mengalami akselerasi pada tahun 2019 sebesar 2,54 persen. Pada tahun 2020, konsumsi pemerintah per kapita mengalami perlambatan menjadi 0,63 persen, setelah sedikit menguat di tahun 2021, konsumsi pemerintah per kapita berkontraksi pada tahun 2022 sebesar 2,96 persen.

Tabel 11.
Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (miliar rupiah)	112 935,06	117 448,94	116 666,16	121 635,31	122 545,78
b. ADHK 2010 (miliar rupiah)	69 973,15	72 248,44	71 414,93	72 890,11	71 634,01
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	5,76	5,53	5,60	5,52	5,06
Konsumsi Pemerintah per kapita (ribu rupiah)					
ADHB	2 319,76	2 395,78	2 422,66	2 493,43	2 480,39
ADHK 2010	1 437,30	1 473,76	1 482,98	1 494,19	1 449,91
Konsumsi Pemerintah per pegawai (ribu rupiah)					
a. ADHB	281 542,99	298 307,28	303 140,00	336 190,25	343 894,52
b. ADHK 2010	174 440,52	183 503,01	185 561,29	201 462,41	201 023,20
Pertumbuhan (persen) ³					
a. Total konsumsi pemerintah	1,97	3,25	-1,15	2,07	-1,72
b. Konsumsi pemerintah per kapita	1,04	2,54	0,63	0,76	-2,96
c. Konsumsi pemerintah per pegawai	6,63	5,20	1,12	8,57	-0,22
Jumlah penduduk (000 orang)	48 683,86	49 023,16	48 156,23	48 782,40	49 405,81
Jumlah pegawai (orang) ⁴	401 129	393 718	384 859	361 805	356 347

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

³ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

⁴ Tidak termasuk polisi dan militer

Rata-rata konsumsi pemerintah per pegawai ADH Berlaku menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama periode 2018-2022. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per pegawai pemerintah sebesar 281,54 juta rupiah, kemudian meningkat secara bertahap dan pada tahun 2022 mencapai 343,89 juta rupiah (lihat Tabel 11).

Pada tingkat harga konstan 2010, indikator pemerataan menurut pegawai juga menunjukkan peningkatan selama periode 2018-2021. Persentase kenaikan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 8,57 persen. Namun pada tahun 2022, konsumsi pemerintah per pegawai mengalami penurunan sebesar 0,22 persen. Di sisi lain, selama periode tahun 2018-2022 jumlah pegawai pemerintah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah pegawai pemerintah sebanyak 401.129 orang; kemudian menurun di setiap tahunnya dan menjadi 356.347 orang di tahun 2022. Penurunan tersebut terjadi terkait dengan kebijakan moratorium penerimaan PNS.

Secara umum, gambaran tentang konsumsi akhir pemerintah secara "riil" tersebut menunjukkan peningkatan baik secara keseluruhan maupun rata-rata (per penduduk maupun per pegawai pemerintah). Parameter ini adalah pendekatan untuk mengukur pemerataan kesempatan masyarakat atas penggunaan sumber daya finansial oleh pemerintah.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah merupakan pengeluaran atas barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah untuk konsumsi akhir, terdiri dari dua komponen, yaitu pengeluaran konsumsi kolektif dan pengeluaran konsumsi individu. Pengeluaran konsumsi kolektif adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang tidak terbatas jumlahnya dan bisa diakses seluruh masyarakat, contoh jasa pertahanan dan keamanan oleh TNI/Polri,

pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pembuatan Akta Tanah, perijinan dan layanan administrasi lainnya. Sedangkan Pengeluaran Konsumsi Individu adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menghasilkan barang dan jasa yang terbatas jumlahnya dan hanya dapat dikonsumsi apabila memenuhi syarat tertentu (biasanya harga), singkatnya adalah konsumsi yang dilakukan oleh pemerintah untuk melayani publik dengan target tertentu. Misalnya pelayanan kesehatan di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas. Dalam konsumsi ini termasuk juga biaya untuk perlindungan sosial.

Secara struktur, bagian terbesar dari total konsumsi akhir pemerintah adalah untuk pengeluaran konsumsi kolektif, yaitu seluruh biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh pemerintah dalam menghasilkan barang dan jasa kolektif. Proporsinya terhadap total konsumsi akhir pemerintah cenderung menurun sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 menjadi 54,07 persen kemudian sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 54,86 persen dengan nilai 67.222,53 miliar rupiah.

Secara nominal, konsumsi individu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2022 yang mengalami sedikit penurunan menjadi 55.323,25 miliar rupiah (Tabel 12). Hal ini sejalan dengan peranannya terhadap total konsumsi pemerintah yang mengalami peningkatan pada periode 2018-2021 dan sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 45,14 persen.

Tabel 12.
Struktur Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Struktur Konsumsi Akhir (Belanja) Pemerintah (ADHB)					
a. Konsumsi Kolektif (miliar rp)	70 165,69	72 707,77	69 534,19	65 766,73	67 222,53
(%)	62,13	61,91	59,60	54,07	54,86
b. Konsumsi Individu (miliar rp)	42 769,37	44 741,18	47 131,96	55 868,58	55 323,25
(%)	37,87	38,09	40,40	45,93	45,14
Total Konsumsi (miliar rp)	112 935,06	117 448,94	116 666,16	121 635,31	122 545,78
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan Riil (ADHK 2010) (%)					
a. Konsumsi Kolektif	0,21	3,04	-4,85	-7,88	-0,21
b. Konsumsi Individu	4,99	3,60	4,86	16,75	-3,48
Total Konsumsi	1,97	3,25	-1,15	2,07	-1,72
Pertumbuhan Indeks Harga Implisit (%)					
a. Konsumsi Kolektif	2,45	0,57	0,51	2,67	2,43
b. Konsumsi Individu	2,88	0,97	0,46	1,53	2,60
Total Konsumsi	2,60	0,72	0,49	2,15	2,52

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasi menjadi investasi (fisik). Atau dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang digunakan sebagai investasi fisik (kapital). Fungsi kapital adalah

sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Investasi merupakan komponen PDB/PDRB yang menghubungkan antara saat ini dan masa mendatang. Investasi memegang peranan penting tidak hanya dalam pertumbuhan siklus usaha jangka panjang tetapi juga dalam jangka pendek karena merupakan komponen yang paling tidak stabil dalam PDRB. Mankiw (2010) mengemukakan bahwa bagian terbesar dari pengeluaran investasi yaitu sejumlah tiga per empat dari total adalah investasi tetap bisnis. Adapun yang dimaksud bisnis adalah investasi barang yang dibeli oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi yang akan datang. Kata tetap artinya pengeluaran ini untuk kapital yang akan tinggal untuk sementara sebagai lawan dari investasi persediaan, yang akan digunakan atau dijual dalam waktu singkat. Investasi tetap bisnis mencakup semuanya, mulai dari perabot kantor hingga pabrik, komputer dan mobil perusahaan.

Perkembangan investasi fisik di wilayah Jawa Barat selama tahun 2022 tercermin dari beberapa indikator ekonomi yaitu informasi belanja modal berupa pembangunan infrastruktur dan belanja modal nonbangunan yang dilakukan oleh seluruh institusi pelaku ekonomi, rumah tangga, lembaga nonprofit, pemerintah dan korporasi. Informasi pendukung untuk mengetahui nilai investasi dapat diperoleh dari data Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) serta fenomena pembangunan di kawasan industri Jawa Barat.

Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan pembangunan investasi fisik tertuang dalam kebijakan pembangunan wilayah berupa pencapaian visi dan misi. Visi yang diusung adalah "Jawa

Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi". Untuk mendukung pencapaian visi ini maka dijabarkan ke dalam lima misi. Pembangunan infrastruktur memiliki relevansi dengan misi ketiga yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan serta tata ruang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah merancang suatu program kerja dan kegiatan yang relevan.

Berbagai program yang digulirkan pemerintah membuahkan hasil. Dilansir dari website Pemprov Jawa Barat, pada tahun 2022 Provinsi Jawa Barat kembali meraih realisasi investasi tertinggi sekita 174 triliun rupiah dan menempati posisi teratas di Indonesia sebagai provinsi dengan realisasi investasi tertinggi. Menurut Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat capaian tersebut dapat dicapai salah satunya karena Jawa Barat termasuk ke dalam provinsi paling memadai dibandingkan daerah lainnya di Indonesia. Sembilan ruas jalan tol yang kini sedang dibangun di berbagai daerah, termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang direncanakan mulai beroperasi Juni 2023 dan menjadi proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara. Selain itu, Pelabuhan Patimban yang masih dalam tahap pembangunan, masuk dalam wilayah Metropolitan Rebana di utara Jawa Barat akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia.

Perkembangan aktivitas investasi fisik di Jawa Barat pada tahun 2018 dan 2019 mengalami peningkatan, tercermin dari nilai PMTB ADH berlaku yang juga mengalami kenaikan menjadi 531.364,62 miliar rupiah. Akibat dari pembatasan aktivitas perekonomian sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*, aktivitas investasi fisik pun mengalami penurunan. Tercatat nilai PMTB tahun 2020 menurun sebanyak 42.184,39 miliar rupiah dibandingkan dengan nilai pada tahun 2019 menjadi 489.180,23 miliar rupiah.

Seiring dengan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi, aktivitas investasi fisik di Jawa Barat mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 545.297,64 miliar rupiah dan 576.895,25 miliar rupiah. Nilai tersebut bahkan sudah melebihi masa sebelum pandemi pada tahun 2019.

Selain dinilai ADH berlaku, PMTB juga dinilai menurut ADH konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang divalusi dengan harga pada tahun 2010. Pengeluaran untuk pembentukan modal (PMTB) mempunyai tren yang sama antara ADH konstan dengan harga berlakunya. Kinerja PMTB menunjukkan kenaikan pada tahun 2018 dan 2019, tercermin dari pertambahan nilai PMTB ADH konstan 2010 selama periode tersebut. Dari 352.312,42 miliar rupiah pada tahun 2018 meningkat sebesar 4,10 persen pada tahun 2019 menjadi 366.760,22 miliar rupiah. Peningkatan nilai PMTB miliar rupiah ADH konstan 2010 menggambarkan pertumbuhan riil komponen PMTB di Jawa Barat karena nilainya tidak dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan harga komponen PMTB.

Kinerja PMTB pada tahun 2020 turut terdampak pandemi *Covid-19* sehingga nilai riil mengalami kontraksi hingga 8,33 persen dibanding tahun sebelumnya menjadi 336.213,72 miliar rupiah. Pada tahun 2021 dan 2022, kinerja PMTB kembali menguat yang tercermin pada pertumbuhan positif masing-masing sebesar 6,47 persen dan 0,29 persen dengan nilai mencapai 359.006,10 miliar rupiah pada tahun 2022.

Komponen PMTB dalam perekonomian Jawa Barat memiliki kontribusi kedua terbesar setelah Konsumsi Rumah Tangga. Peranan komponen PMTB selama lima tahun terakhir (2018-2022) sebesar 24,47 persen terhadap total PDRB. Kontribusi PMTB terhadap perekonomian Jawa

Barat mengalami capaian terbesar di tahun 2018 yaitu sebesar 25,29 persen dan terendah di tahun 2020 sebesar 23,47 persen.

Tabel 13.

Perkembangan dan Struktur PMTB Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total PMTB					
a. ADHB (miliar rp)	495 827,14	531 364,62	489 180,23	545 297,64	576 895,25
b. ADHK 2010 (miliar rp)	352 312,42	366 760,22	336 213,72	357 977,88	359 006,10
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	25,29	25,03	23,49	24,73	23,81
Struktur PMTB [1]					
a. Bangunan (miliar rp)	379 900,23	415 877,92	392 849,74	436 960,10	452 921,79
(%)	76,62	78,27	80,31	80,13	78,51
b. Nonbangunan (miliar rp)	115 926,91	115 486,70	96 330,49	108 337,54	123 973,46
(%)	23,38	21,73	19,69	19,87	21,49
Total PMTB (miliar rp)	495 827,14	531 364,62	489 180,23	545 297,64	576 895,25
(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertumbuhan[2] (%)					
a. Bangunan	7,48	6,12	-5,96	5,84	-2,01
b. Nonbangunan	0,66	-2,94	-17,33	9,22	9,91
Total PMTB	5,88	4,10	-8,33	6,47	0,29

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Komponen PMTB pada periode 2018 tumbuh sebesar 5,88 persen dan tahun 2019 mengalami perlambatan sebesar 4,10 persen. Pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap kinerja PMTB tahun 2020 yang mengalami kontraksi hingga 8,33 persen. Memasuki tahun 2021 komponen PMTB kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 6,47 persen, dan kembali mengalami perlambatan sebesar 0,29 persen pada tahun 2022.

Meskipun demikian nilai secara riil belum dapat melebihi nilai sebelum terjadinya pandemi *Covid-19* (Tabel 13).

Komponen PMTB didisagregasi menjadi dua subkomponen dalam publikasi ini yaitu bangunan dan non bangunan. Pengeluaran untuk jenis aset fisik berupa bangunan mendominasi dalam perekonomian Jawa Barat. Hal ini terlihat dari proporsi PMTB bangunan sebesar lebih dari tiga per empat bagian total PMTB. Peranan komponen PMTB bangunan terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 80,31 persen dan berangsur-angsur mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 80,13 persen dan 78,51 persen.

Sementara itu, komponen PMTB nonbangunan memiliki rincian sebagai berikut: Mesin dan Perlengkapan; Kendaraan; Peralatan lainnya; Tanaman Menghasilkan Produk Berulang; Hewan Menghasilkan Berulang; Produk Kekayaan Intelektual dan Biaya Pemindahan Kepemilikan Aset yang Tidak Diproduksi. Selama periode 2018-2022, Peranan PMTB nonbangunan terbesar terjadi pada tahun 2018 sebesar 23,38 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar 19,69 persen. Peranan komponen PMTB nonbangunan memiliki kecenderungan yang semakin mengecil selama kurun 2018-2020 kemudian meningkat peranannya pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kontribusi PMTB bangunan.

Secara riil subkomponen PMTB bangunan pada tahun 2018 menunjukkan kinerja positif sebesar 7,48 persen dan sedikit mengalami perlambatan pada tahun 2019 menjadi 6,12 persen. Aktivitas pembangunan sarana dan prasarana pada tahun 2020 menurun dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara proporsional di Jawa Barat pada Triwulan II tahun 2020 sehingga berdampak pada kinerja PMTB Bangunan yang berkontraksi sebesar 5,96

persen. Pada tahun 2021 meskipun masih terdapat pembatasan aktivitas ekonomi kinerja PMTB bangunan mengalami peningkatan sebesar 5,84 persen. Namun mengalami kontraksi sebesar 2,01 persen pada tahun 2022. Hal ini didukung oleh realisasi pengadaan semen sepanjang tahun 2022 yang mengalami penurunan 11,48 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sementara itu, indikator yang dapat digunakan untuk mengamati perkembangan penambahan barang modal berupa mesin-mesin, kendaraan, peralatan dan perlengkapan dapat dicermati pada data Impor Barang Modal menurut penggolongan penggunaan barang atau *Broad Economics Category* (BEC). Komponen PMTB nonbangunan memiliki rincian sebagai berikut: mesin dan perlengkapan; kendaraan; peralatan lainnya; tanaman menghasilkan produk berulang; hewan menghasilkan berulang; produk kekayaan intelektual dan biaya pemindahan kepemilikan aset yang tidak diproduksi.

Secara umum kinerja subkomponen PMTB nonbangunan pada periode 2018-2020 memiliki tendensi yang semakin menurun. Pada awal periode tahun 2018 subkomponen ini mencatatkan kinerja positif sebesar 0,66 persen. Pada tahun 2019 kinerja PMTB nonbangunan mengalami kontraksi sebesar 2,94 persen. Kontraksi semakin dalam terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak pandemi *Covid-19*, hal ini terindikasi dari kinerja PMTB nonbangunan yang terkontraksi cukup dalam yaitu sebesar 17,33 persen. Belanja barang modal kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 dengan kinerja positif masing-masing sebesar 9,22 persen dan 9,91 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Deskripsi inventori pada unit institusi merupakan persediaan barang yang belum atau tidak digunakan dalam proses produksi, belum selesai diproses, atau belum terjual. Sementara perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori yang bermakna penambahan atau pengurangan. Secara makro, inventori merupakan bagian dari pembentukan modal atau investasi fisik. Informasi inventori menjelaskan mengenai porsi investasi yang telah terealisasi dalam bentuk barang jadi maupun setengah jadi dalam berbagai aktivitas produksi. Sebagian investasi ini direalisasikan untuk keperluan bahan baku maupun bahan penolong.

Komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang nilainya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (di samping komponen net ekspor antar daerah). Perubahan inventori yang bertanda positif bermakna bahwa terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan jika bertanda negatif bermakna bahwa terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna.

Kontribusi Komponen Perubahan Inventori dalam perekonomian Jawa Barat dalam lima tahun terakhir cukup rendah, yakni selalu berada di bawah 4 persen setiap tahunnya. Bahkan di tahun 2021 nilai perubahan inventori Jawa Barat bertanda negatif, yang berarti terjadi penurunan inventori di akhir tahun 2021 jika dibandingkan dengan awal tahun. Pada tahun 2022 kontribusi komponen perubahan inventori sebesar 0,10 persen. Perkembangan nilai komponen perubahan inventori dan proporsinya dalam

perekonomian Jawa Barat selama periode 2018-2022 ditampilkan pada Tabel 14.

Tabel 14.
Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (miliar rp)	72 019,60	73 290,76	27 303,94	-15 151,20	2 492,32
b. ADHK (miliar rp)	43 588,21	43 599,93	16 198,45	-8 456,84	1 390,51
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB) ^[1]	3,67	3,45	1,31	-0,69	0,10

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

^[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

Dalam kondisi normal (sebelum Pandemi *Covid-19*) secara nominal, perubahan inventori Provinsi Jawa Barat memiliki kecenderungan yang meningkat setiap tahun. Pada tahun 2018 nilai nominal perubahan inventori Jawa Barat adalah sebesar 72.019,60 miliar rupiah atau sebesar 3,67 persen dari nilai PDRB Provinsi Jawa Barat pada tahun tersebut. Pada periode 2019, perubahan inventori Jawa Barat meningkat menjadi sebesar 73.290,76 miliar rupiah, namun proporsi perubahan inventori di dalam perekonomian Jawa Barat justru mengalami sedikit penurunan, yaitu menjadi sebesar 3,45 persen.

Selanjutnya di tahun 2020, dalam kondisi pandemi di mana kinerja perekonomian Jawa Barat mengalami kontraksi sebesar 2,52 persen, peranan perubahan inventori di dalam PDRB Jawa Barat pun terkoreksi cukup signifikan, yakni menjadi sekitar 1,31 persen. Di tahun 2020, nilai komponen perubahan inventori mengalami penurunan sebesar 45.986,82 miliar rupiah, yang mengakibatkan nilai perubahan inventori Jawa Barat

terkoreksi menjadi sebesar 27.303,94 miliar rupiah. Kebijakan *lockdown* di beberapa negara mitra dagang menyebabkan arus barang ekspor dan impor luar negeri menjadi terhambat. Begitu pula dengan adanya pembatasan mobilitas manusia pun menyebabkan proses produksi barang dan jasa mengalami penurunan. Proses produksi lebih banyak memanfaatkan bahan baku yang sudah ada karena terhambatnya arus masuk barang impor dari luar negeri.

Pelonggaran aktivitas ekonomi yang diterapkan di tahun 2021 berdampak positif pada perbaikan perekonomian Jawa Barat. Setelah mengalami kontraksi sebesar 2,52 di tahun 2020, produksi barang dan jasa Jawa Barat kembali meningkat di 2021, tercermin pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang bernilai positif sebesar 3,74 persen. Peningkatan utilitas produksi memanfaatkan bahan baku yang sudah ada, sedangkan barang jadi yang tertahan di produsen maupun pedagang karena adanya pembatasan di tahun 2020 sudah mulai terdistribusikan seiring dengan penerapan PPKM berlevel. Hal itu mengakibatkan inventori di akhir tahun 2021 menjadi lebih rendah dari pada kondisi di awal tahun. Kondisi tersebut berimplikasi pada nilai perubahan inventori Jawa Barat bertanda negatif yaitu senilai -15.151,20 miliar rupiah atau menurun sekitar 42.455,13 miliar rupiah jika dibandingkan nilai di tahun sebelumnya.

Selanjutnya di tahun 2022, perekonomian Jawa Barat kembali mendekati kondisi normal. Perubahan inventori kembali meningkat menjadi sebesar 2.492,32 miliar rupiah atau mengalami kenaikan 116,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Besaran perubahan inventori menunjukkan angka positif yang dapat diartikan bahwa terjadi penambahan dalam persediaan barang.

Perubahan nilai nominal komponen perubahan inventori dipengaruhi oleh perubahan volume dan perubahan harga, sehingga untuk melihat kondisi perubahan inventori dalam nilai riilnya, dapat digunakan nilai atas dasar harga konstan. Dalam lima tahun terakhir nilai riil komponen perubahan inventori Jawa Barat memperlihatkan pola yang sama dengan nilai nominalnya. Nilai riil komponen perubahan inventori sebesar 43.588,21 miliar rupiah pada tahun 2018, dan meningkat menjadi 43.599,93 miliar rupiah di tahun 2019. Kontraksi ekonomi yang terjadi di 2020 mempengaruhi jumlah inventori, di mana barang menjadi banyak yang tertahan di produsen maupun pedagang karena adanya pembatasan pergerakan. Kegiatan ekspor yang terhambat, menyebabkan arus barang lebih banyak beredar di wilayah domestik dan antar provinsi, namun hal itu tidak maksimal karena pembatasan mobilitas dan menurunnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan nilai riil perubahan inventori Jawa Barat menurun drastis menjadi sebesar 16.198,45 miliar rupiah pada tahun 2020.

Memasuki tahun 2021, produsen berusaha menggenjot utilitas seiring dengan adanya kebijakan pelonggaran kegiatan pada sektor-sektor tertentu. Proses produksi lebih banyak mengandalkan bahan baku yang sudah ada karena aktivitas impor belum kembali sepenuhnya normal. Distribusi barang berjalan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020, menyebabkan stok barang yang tertahan dapat dikurangi. Hal itu berimplikasi pada nilai riil komponen perubahan inventori yang bertanda negatif, yakni sebesar -8.456,84 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2022, secara riil komponen perubahan inventori mengalami peningkatan dan menunjukkan angka positif sebesar 1.390,51 miliar rupiah.

Perubahan inventori merupakan salah satu faktor pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Sebagian inventori merupakan bagian dari investasi, sedangkan perubahan inventori terjadi karena adanya proses produksi maupun impor. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengamati aktivitas inventori antara lain dengan mengamati nilai impor bahan baku. Data KPPBC lingkup Jawa Barat menunjukkan kontribusi impor bahan baku yang dilakukan oleh Jawa Barat sangat signifikan yaitu sebesar 79,88 persen pada tahun 2022. Jenis impor bahan baku dominan adalah kelompok bahan baku untuk industri dengan kontribusi sekitar 45,89 persen dari keseluruhan nilai impor Jawa Barat di tahun 2022. Secara kumulatif, nilai impor bahan baku/penolong Jawa Barat tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 14,94 persen dibandingkan tahun 2021. Pendekatan lain untuk mengamati perubahan inventori adalah melalui data persediaan dan produksi beras. Berdasarkan data hasil KSA (Kerangka Sampel Area) tahun 2022, produksi padi Jawa Barat tumbuh sebesar 4,12 persen dibandingkan tahun lalu, yaitu dari sebanyak 9,11 juta ton di tahun 2021 menjadi 9,49 juta ton di tahun 2022.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR BARANG DAN JASA

Komoditas yang diperdagangkan dalam kegiatan ekspor berasal dari output yang dihasilkan oleh aktivitas produksi suatu wilayah pada suatu periode tertentu setelah dikurangi dengan konsumsi dan investasi. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi oleh residen di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh nonresiden pihak di luar wilayah atau luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar

(termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya. Permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayah Jawa Barat tidak seluruhnya dilakukan oleh residen, tetapi terdapat permintaan dari nonresiden. Permintaan barang dan jasa terhadap produk domestik dari nonresiden di mana diwujudkan dalam aktivitas perdagangan internasional berupa transaksi ekspor.

Perang antara Rusia dan Ukraina menyebabkan efek domino terhadap perekonomian, terutama berdampak pada aktivitas perdagangan internasional. Pemulihan ekonomi global mulai terlihat sejak tahun 2021 dan terus mengalami perbaikan pada tahun 2022. Hal ini terlihat dari data transaksi perdagangan antar negara yang menunjukkan peningkatan. Permintaan global terhadap komoditas yang berasal dari Jawa Barat khususnya masih mengalami peningkatan meskipun melemah sebagai dampak dari pembatasan akses gas, minyak, dan komoditas akibat invasi Rusia ke Ukraina. Namun, permintaan ekspor khususnya dari Jawa Barat terhadap barang dan jasa dari negara-negara mitra dagang utama seperti Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara lainnya masih meningkat.

Jawa Barat merupakan wilayah dengan kontribusi ekspor luar negeri terbesar di tingkat nasional. Ekspor Indonesia terbesar menurut provinsi asal barang periode Januari – Desember 2022 adalah Jawa Barat dengan nilai US\$38,59 miliar (13,22 persen), diikuti oleh Kalimantan Timur sebesar US\$36,46 miliar (12,49 persen), dan Jawa Timur sebesar US\$24,75 miliar (8,48 persen). Data ini menunjukkan bahwa kinerja ekspor Jawa Barat memiliki dampak signifikan di tingkat nasional, hal ini tidak terlepas dari peranan utama ekspor sebagai penghasil devisa negara. Selain itu ekspor berperan dalam perluasan pasar bagi produk domestik, peningkatan jumlah

investasi dalam negeri, serta memperbaiki ekonomi negara karena dapat memperbesar cadangan devisa negara tersebut.

Gambaran aktivitas ekspor di Jawa Barat selama tiga periode (2018 –2020) menunjukkan bahwa selama tahun 2018-2019 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan baik secara nominal maupun riil. Komponen ekspor merupakan faktor penambah bagi perekonomian wilayah, devisa yang dihasilkan dari kegiatan ekspor dapat dioptimalkan untuk kegiatan pembangunan, selain itu dapat mendorong aktivitas ekonomi produktif wilayah. Aktivitas ekspor tahun 2022 mengalami peningkatan kinerja. Secara nominal atas dasar harga berlaku komponen Ekspor Barang dan Jasa pada lima tahun terakhir (2018 – 2022) mengalami penambahan sebesar 416.370,77 miliar rupiah, nilai ekspor pada tahun 2018 masih pada posisi 859.971,31 miliar rupiah dan pada tahun 2022 telah mencapai 1.276.342,07 miliar rupiah. Sementara secara riil nilai pada tahun 2018 sebesar 550.805,25 miliar rupiah dan tahun 2022 telah mencapai 756.908,42 atau terjadi penambahan selama kurun waktu tersebut sebesar 206.103,17 miliar rupiah.

Peranan komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap total perekonomian Jawa Barat selama 2018-2022 secara rata-rata sebesar 47,17 persen. Selama empat periode (2018-2021) kontribusi komponen ini cenderung mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Komponen Ekspor Barang dan Jasa ini meskipun memiliki kontribusi yang besar dan berperan sebagai faktor penambah dalam perekonomian perlu dibandingkan dengan kontribusi komponen Impor Barang dan jasa sebagai faktor pengurang dalam perekonomian.

Tabel 15.

Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (miliar rp)	859 971,31	943 711,91	914 423,48	1 122 988,05	1 276 342,07
b. ADHK 2010 (miliar rp)	550 805,25	591 685,34	558 716,78	681 316,21	756 908,42
Proporsi terhadap PDRB (%-ADHB) ^[1]	43,86	44,45	43,92	50,94	52,68
Pertumbuhan					
Total ekspor ^[2]	11,52	7,42	-5,57	21,94	11,10

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Selama tiga periode (2018 – 2020) kinerja Ekspor Barang dan Jasa setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun 2021 seiring membaiknya ekonomi global terdampak Pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2018 komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan dua digit sebesar 11,52 persen. Pada tahun 2019 pertumbuhan komponen ini mengalami perlambatan sebesar 7,42 persen. Perlambatan pertumbuhan di tahun 2019 merupakan imbas dari sengketa dagang antara Amerika Serikat dan China di mana kedua negara ini merupakan mitra dagang Jawa Barat. Memasuki tahun 2020 kinerja Ekspor Barang dan Jasa berkontraksi 5,57 persen seiring merebaknya Pandemi *Covid-19* sehingga berpengaruh terhadap permintaan ekspor global. Pemulihan ekonomi global memicu permintaan terhadap komoditas ekspor Jawa Barat sehingga terjadi pertumbuhan signifikan sebesar 21,94 persen pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 kinerja Ekspor Barang dan Jasa mengalami perlambatan

pertumbuhan menjadi 11,10 persen akibat perang panas Rusia dan Ukraina yang mengganggu arus perdagangan internasional.

Berdasarkan kontribusi terhadap nilai ekspor non migas, urutan negara tujuan ekspor non migas Jawa Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut: Amerika Serikat US\$7,46 miliar (19,49 persen); Jepang US\$3,40 (8,87 persen); Filipina US\$2,88 (7,52 persen); Thailand US\$2,32 (6,07 persen); dan Tiongkok US\$2,30 (6,00 persen). Kelima negara tujuan ekspor ini berkontribusi hampir separuh dari total ekspor Jawa Barat atau sebesar 47,95 persen. Ekspor Jawa Barat dengan tujuan kelima negara tersebut mengalami kinerja positif, kecuali Tiongkok.

Komoditas ekspor nonmigas utama Jawa Barat pada tahun 2022 berdasarkan peranannya terhadap ekspor total adalah sebagai berikut : 1) Kendaraan dan Bagiannya (17,86 persen); 2) Mesin dan Perlengkapan Elektrik (13,67 persen); 3) Mesin dan Peralatan Mekanis (8,88 persen); 4) Alas Kaki (7,47 persen); 5) Barang-barang Rajutan (6,55 persen); 6) Karet dan Barang dari Karet (4,32 persen); 7) Pakaian Jadi Bukan Rajutan (4,00 persen); 8) Serat Stafel Buatan (3,18 persen); 9) Kertas / Karton (3,12 persen); dan 10) Plastik dan Barang dari Plastik (2,07 persen).

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR BARANG DAN JASA

Kebutuhan terhadap barang dan jasa seluruh entitas ekonomi di Jawa Barat tidak dapat seluruhnya dipenuhi dari output hasil produksi wilayah Jawa Barat. Keterbatasan sumberdaya merupakan salah satu alasan dilakukannya aktivitas permintaan barang dan jasa dari luar wilayah Jawa Barat yaitu luar provinsi dan luar negeri. Pemenuhan kebutuhan konsumsi antara untuk sektor bisnis dan konsumsi akhir serta investasi dapat dilakukan dengan impor barang dan jasa.

Komponen Impor Barang dan Jasa merupakan komponen pengurang dalam PDRB Pengeluaran. Pengukuran potensi dan besaran produk domestik dilakukan dengan mengeluarkan komponen Impor Barang dan Jasa dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impor. Hasil pengurangan secara konsep sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Transaksi impor menjelaskan penambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari nonresiden. Tabel 16 di bawah ini menunjukkan perkembangan impor barang dan jasa Jawa Barat dalam lima tahun terakhir.

Tabel 16.

Perkembangan Impor Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Nilai Impor					
a. ADHB (miliar rp)	871 157,99	944 054,68	857 711,88	1 008 464,59	1 140 671,12
b. ADHK 2010 (miliar rp)	485 078,85	513 431,14	432 249,84	511 100,18	556 711,44
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	44,43	44,46	41,19	45,74	47,08
Pertumbuhan					
Total impor	10,49	5,84	-15,81	18,24	8,92

Keterangan : *angka sementara **angka sangat sementara

[1] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku/ADHB)

[2] Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Selama tiga periode (2018-2020) komponen Impor Barang dan Jasa mengalami peningkatan secara nominal, penurunan terjadi di tahun 2020 terdampak Pandemi *Covid-19* dan kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022 seiring meningkatnya aktivitas produksi yang membutuhkan bahan baku, di mana impor bahan baku memiliki kontribusi terbesar dalam impor

Jawa Barat. Besaran impor total pada tahun 2018 pada posisi 871.157,99 miliar rupiah kemudian pada tahun 2022 mencapai 1.140.671,12 miliar rupiah dengan penambahan nilai selama kurun lima tahun sebesar 269.513,13 miliar rupiah. Sementara secara riil nilai komponen ini pada tahun 2018 sebesar 485.078,85 miliar rupiah dan pada tahun 2022 telah mencapai 556.711,44 miliar rupiah atau terjadi penambahan nilai sebesar 71.632,59 miliar rupiah.

Peranan Impor Barang dan Jasa selama tahun 2018 – 2019 terhadap perekonomian Jawa Barat memiliki tendensi yang meningkat, namun terjadi penurunan pada tahun 2020 kemudian selama tahun 2021 dan 2022 terus mengalami peningkatan. Selama periode lima tahun terakhir (2018-2022) peranan terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 47,08 persen dan peranan terkecil pada tahun 2020 sebesar 41,19 persen. Komposisi impor mendekati 50 persen ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Jawa Barat memiliki ketergantungan yang besar terhadap komoditas dari luar provinsi dan luar negeri. Hal ini sejalan dengan karakteristik jenis impor Jawa Barat yaitu mayoritas merupakan impor bahan baku yaitu sebesar 82,50 persen pada tahun 2021, sementara pada tahun 2022 impor bahan baku memiliki kontribusi sebesar 79,88 persen.

Kinerja komponen Impor Barang dan Jasa selama tahun 2018 – 2022 cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi. Pada awal periode yaitu tahun 2018 mengalami pertumbuhan positif signifikan sebesar 10,49 persen, kemudian melambat pada tahun 2019 sebesar 5,84 persen. Kontraksi cukup dalam terjadi di tahun 2020 sebesar 15,81 persen sebagai dampak melambatnya aktivitas produksi terdampak Pandemi *Covid-19*. Peningkatan signifikan terjadi di tahun 2021 sebesar 18,24 persen seiring dengan pemulihan aktivitas

perekonomian. Pada tahun 2022, kinerja komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 8,92 persen akibat perang Rusia dan Ukraina yang berdampak signifikan terhadap perdagangan global. Apabila dicermati, kinerja Komponen Impor Barang dan Jasa setiap periode selama lima tahun (2018-2022) memiliki pola yang sama dengan kinerja komponen Ekspor Barang dan Jasa.

Pertumbuhan impor yang tinggi di satu sisi bagi Jawa Barat dapat menggerakkan aktivitas ekonomi di sisi *supply* karena mayoritas menggunakan bahan baku impor, tetapi di sisi lain menggambarkan ketergantungan yang besar terhadap produk luar Jawa Barat. Kebijakan pemerintah untuk aktivitas impor harus diarahkan untuk mengurangi secara bertahap ketergantungan bahan baku impor agar tidak menjadi pengurang bagi perekonomian wilayah.

Distribusi impor luar negeri menurut klasifikasi *Broad Economic Categories* (BEC) yaitu menunjukkan kategori akhir penggunaan barang. pada tahun 2022 yaitu (1) impor bahan baku sebesar 79,88 persen (2) impor barang modal sebesar 12,86 persen dan (3) impor barang konsumsi sebesar 7,27 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas impor luar negeri Jawa Barat didominasi oleh impor bahan baku sehingga ketika demand terhadap ekspor barang meningkat maka akan memicu peningkatan aktivitas impor untuk memenuhi bahan baku atau barang modal.

Komoditas andalan impor nonmigas Jawa Barat berdasarkan peranannya terhadap total impor luar negeri adalah 1) Mesin dan Perlengkapan Elektrik (17,49 persen); 2) Mesin dan Peralatan Mekanis (13,79 persen); 3) Kain Rajutan (8,41 persen); 4) Plastik dan Barang dari Plastik (8,43 persen); 5) Filamen Buatan (6,34 persen); 6) Kapas (5,47 persen); 7) Karet dan Barang dari Karet (2,27 persen); 8) Serat Stafel Buatan (2,11 persen); 9) Besi

dan Baja (1,90 persen) dan 10) Perabot, Penerangan Rumah (1,83 persen). Kontribusi kesepuluh komoditas utama impor nonmigas Jawa Barat mencapai 68,04 persen dari total nilai impor nonmigas Jawa Barat.

Negara-negara importir utama Jawa Barat pada tahun 2022 dengan kontribusi terbesar berturut-turut adalah sebagai berikut: Tiongkok US\$3,97 miliar (34,01 persen); Korea Selatan US\$1,75 miliar (14,96 persen); Jepang US\$1,65 miliar (14,14 persen); Taiwan US\$0,70 miliar (5,99 persen); dan Vietnam US\$0,58 miliar (4,94 persen). Kelima negara asal impor ini berkontribusi hampir tiga perempat bagian dari total impor Jawa Barat atau sebesar 74,04 persen. Kinerja impor Jawa Barat yang berasal dari kelima negara memiliki pertumbuhan positif, kecuali Korea Selatan dan Vietnam.

Neraca perdagangan Jawa Barat pada tahun 2022 mengalami surplus sebesar US\$24,36 miliar lebih besar dibandingkan surplus pada tahun 2021 sebesar US\$21,87 miliar. Seiring dengan membaiknya perekonomian Jawa Barat khususnya, maka permintaan global terhadap komoditas ekspor Jawa Barat semakin tinggi sehingga dapat melebihi impornya.

Defisit neraca perdagangan Jawa Barat terbesar pada tahun 2022 terjadi dengan negara Tiongkok artinya ekspor Jawa Barat ke Tiongkok lebih kecil dibandingkan dengan impor Tiongkok ke Jawa Barat dengan jumlah yang sangat signifikan yaitu sebesar US\$1,68 miliar lebih besar dibandingkan defisit tahun 2021 sebesar US\$1,26. Lebih lanjut, jika dicermati rasio ekspor terhadap impor pada tahun 2022 sebesar 0,58 lebih kecil dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 0,65. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian Jawa Barat masih mengalami ketergantungan cukup tinggi terhadap barang dan jasa dari Tiongkok, dalam hal ini perlu

dipertimbangkan suatu kebijakan peningkatan daya saing dan insentif bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor.

<https://jabar.bps.go.id>

BAB IV

*PERKEMBANGAN AGREGAT
PDRB MENURUT PENGELUARAN
PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2018-2022*

<http://jabar.bps.go.id>



BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018-2022

Pasca pandemi *Covid-19* yang melanda dunia sejak 2020, proses pemulihan perekonomian Indonesia sudah dimulai pada kuartal kedua tahun 2021 yang ditandai dengan kembali tumbuhnya perekonomian Indonesia setelah mengalami kontraksi selama empat kuartal sebelumnya. Pemulihan perekonomian Indonesia yang terus berlanjut di sepanjang tahun 2022, tentu berdampak pula pada perekonomian Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi penyangga Ibu Kota Negara. Tingkat penyebaran kasus *Covid-19* di Provinsi Jawa Barat yang disebabkan oleh merebaknya varian Omicron mencapai puncaknya di bulan Februari 2022 dan mengakibatkan Pemerintah memperpanjang kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Meskipun demikian, secara umum kebijakan penerapan PPKM di wilayah Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan level. Hal itu memberikan dampak positif pada kinerja perekonomian Jawa Barat, yakni terjadinya perbaikan di hampir seluruh komponen pengeluaran, yakni pengeluaran rumah tangga, lembaga nonprofit, PMTB dan ekspor-impor.

Upaya pemulihan ekonomi tersebut tentunya berpengaruh terhadap perubahan pola dan struktur yang meliputi perbandingan atau rasio antar komponen seperti perbandingan konsumsi rumah tangga terhadap nilai ekspor, PMTB, dan nilai PDRB total. Demikian juga perbandingan antar nilai ekspor terhadap PMTB, nilai PDRB terhadap impor, keseimbangan total penyediaan dengan total permintaan dan neraca

perdagangan. Indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari data PDRB. PDRB sisi pengeluaran mengukur nilai produk domestik dari sisi pengguna yaitu dalam menghasilkan produk barang dan jasa di suatu wilayah mampu menggambarkan siapa pengguna akhir dari produk tersebut yaitu rumah tangga, LNPRT, perusahaan, dan pemerintah. Agregat PDRB pengeluaran ini merupakan besaran pokok dan indikator ringkas untuk tujuan analisis ekonomi makro, perbandingan antar waktu maupun antar wilayah. Agregat tersebut merupakan nilai gabungan yang mengukur aspek tertentu dari aktivitas keseluruhan ekonomi.

Namun demikian, analisis perbandingan pengeluaran PDRB untuk permintaan akhir baik konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRT, Konsumsi Pemerintah, PMTB dan Ekspor, di dalamnya masih termasuk sebagian produk yang berasal dari impor.

4.1 PERKEMBANGAN PDRB MENURUT PENGELUARAN 2018-2022

Agregat PDRB pengeluaran menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan (konsep bruto). PDRB dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui pendekatan nilai tambah. Proses tersebut dapat berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, dengan dukungan berbagai faktor produksi serta sumber daya alam yang tersedia. Dengan demikian, nilai tambah bruto yang sebagian besar menggambarkan balas jasa (kompensasi atas) faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal (kapital) dan keahlian (kewirausahaan), merupakan inti dari analisis PDRB.

PDRB menurut pengeluaran atau permintaan akhir menjelaskan tentang aspek konsumsi dan akumulasi, bukan aspek produksi. PDRB menurut pengeluaran menjelaskan sejumlah pengeluaran konsumsi akhir atas barang dan jasa (semua konsumsi kecuali konsumsi antara), yang diukur pada harga pembeli kemudian dikurangi dengan impor barang dan jasa. Dengan demikian, nilai PDRB ini dapat digunakan sebagai ukuran produktivitas yang menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik. Namun, nilai agregat PDRB di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan.

Salah satu indikator untuk melihat perkembangan pemerataan suatu wilayah yaitu dengan pendekatan nilai PDRB per kapita. *Series* data PDRB per kapita memberi gambaran rata-rata kemampuan setiap penduduk Jawa Barat dalam menciptakan PDRB dari tahun ke tahun. Tabel 17 memberikan gambaran perkembangan PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun konstan, serta perkembangan per kapita dan laju pertumbuhan penduduk per tahun selama lima tahun terakhir (2018-2022). Setelah terjadi kontraksi sebesar -2,52 persen di tahun 2020, pada tahun 2021 perekonomian Jawa Barat kembali tumbuh sebesar 3,74 persen dan terus berlanjut di tahun 2022 sebesar 5,45 persen. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat di dua tahun terakhir belum kembali ke laju pertumbuhan normalnya, di mana selama periode sepuluh tahun sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*, perekonomian Jawa Barat secara rata-rata tumbuh sebesar 5,68 persen per tahun. Namun demikian, besaran nilai PDRB baik secara berlaku maupun konstan di tahun 2021 dan 2022 sudah melampaui nilai PDRB sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*.

Tabel 17.
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per Kapita
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Nilai PDRB (miliar rp)					
- ADHB	1 960 627,65	2 123 153,71	2 082 107,25	2 204 660,23	2 422 782,32
- ADHK 2010	1 419 624,14	1 490 959,69	1 453 380,72	1 507 746,39	1 589 984,93
PDRB per kapita (ribu rp)					
- ADHB	40 272,64	43 309,19	43 236,51	45 193,76	49 038,41
- ADHK 2010	29 160,15	30 413,37	30 180,54	30 907,59	32 182,15
Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK 2010	4,25	4,30	-0,77	2,41	4,12
Jumlah penduduk (000 org)	48 683,86	49 023,16	48 156,23	48 782,40	49 405,81
Pertumbuhan Penduduk	1,34	0,70	-1,77	1,30	1,28

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat di tahun 2018 mencapai 40,27 juta rupiah dan meningkat menjadi sebesar 43,31 juta rupiah di tahun 2019. Pada tahun 2020, nilai PDRB per kapita Jawa Barat sedikit menurun menjadi sebesar 43,24 juta rupiah sebagai akibat dari terjadinya pandemi *Covid-19*. Nilai PDRB per kapita Jawa Barat kembali meningkat di tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi sebesar 45,19 juta rupiah dan 49,04 juta rupiah. Peningkatan nilai PDRB per kapita yang terjadi di dua tahun terakhir telah melampaui nilai PDRB per kapita tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi *Covid-19*.

Selain berdasarkan nilai besarnya, perkembangan PDRB per kapita dapat pula diamati melalui laju pertumbuhannya. Selama lima tahun terakhir, laju pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Barat tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 4,30 persen dan terendah pada tahun 2020 yakni

terjadi penurunan sebesar -0,77 persen. Laju pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Barat pasca pandemi *Covid-19* perlahan kembali meningkat. Di tahun 2021 laju pertumbuhan PDRB per kapita Jawa Barat adalah sebesar 2,41 persen dan meningkat lebih cepat di tahun 2022 sebesar 4,12 persen.

Laju pertumbuhan nilai PDRB per kapita dipengaruhi oleh dua hal yaitu nilai PDRB yang tercipta dan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan PDRB per kapita berbanding lurus dengan laju pertumbuhan nilai PDRB yang tercipta dan berbanding terbalik dengan laju peningkatan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat selama kurun lima tahun terakhir (2018-2022) cukup fluktuatif. Tercatat pada tahun 2018 laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 1,34 persen, tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Memasuki tahun 2019, kenaikan jumlah penduduk Jawa Barat melambat sebesar 0,70 persen, kemudian mengalami kontraksi di tahun 2020 sebesar -1,77 persen. Penurunan jumlah penduduk di tahun 2020 sebagai salah satu dampak dari pandemi *Covid-19* yang mana di tahun tersebut terjadi perubahan jumlah penduduk akibat dari perpindahan penduduk dari wilayah sentra pendidikan sebagai akibat dari perubahan sistem pembelajaran dari tatap muka menjadi pembelajaran daring, maupun wilayah industri sebagai akibat dari pengurangan jumlah pekerja, sebagai eksekusi penanganan pandemi *Covid-19* seperti "*lockdown*" dan PPKM. Selanjutnya di tahun 2021 dan 2022, laju pertumbuhan penduduk kembali ke level satu persen, masing-masing sebesar 1,30 persen dan 1,28 persen.

4.2 PERBANDINGAN PENGELUARAN PDRB UNTUK KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP EKSPOR

Indikator perbandingan pengeluaran PDRB untuk konsumsi akhir rumah tangga terhadap ekspor memberikan gambaran mengenai seberapa besar hasil produk wilayah tersebut digunakan untuk konsumsi akhir rumah tangga dan digunakan untuk ekspor. Perbandingan antara produk yang dikonsumsi rumah tangga di wilayah domestik dengan produk yang diekspor lebih jauh memberikan informasi juga mengenai rasio antara konsumsi rumah tangga dengan ekspor.

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga adalah pengeluaran yang terdiri atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan oleh rumah tangga residen. Konsumsi ini meliputi konsumsi yang diperoleh dari pembelian dan perkiraan transaksi barter yaitu barang dan jasa yang diterima dari pihak lain, dan barang dan jasa yang diproduksi dan dikonsumsi sendiri. Sedangkan ekspor adalah barang dan jasa hasil produk wilayah tersebut yang digunakan oleh nonresiden wilayah tersebut.

Pada saat terjadinya pandemi *Covid-19*, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di dalam negeri dan kebijakan *lockdown* di beberapa negara menyebabkan aktivitas produksi dan distribusi menjadi terhambat. Hal itu mengakibatkan roda perekonomian lebih banyak digerakkan oleh aktivitas konsumsi, terutama konsumsi rumah tangga. Pada periode 2018-2019, konsumsi rumah tangga Jawa Barat mengalami peningkatan dari 1.278,28 triliun rupiah di 2018 menjadi 1.387,76 triliun rupiah di 2019. Pada periode tersebut peranan konsumsi rumah tangga terhadap perekonomian Jawa Barat secara berturut-turut adalah sebesar 65,20 persen dan 65,36 persen. Di tahun 2020, meskipun nilai konsumsi rumah tangga menurun 8,85 triliun rupiah, akan tetapi peranannya justru

meningkat menjadi 66,23 persen seiring dengan penurunan yang lebih tajam pada komponen lainnya. Pada periode 2021—2022 pemulihan ekonomi sudah terasa karena diberlakukannya berbagai pelonggaran aktivitas masyarakat, baik di dalam negeri maupun di negara lain. Hal itu mengakibatkan peran sektor-sektor produktif seperti investasi dan ekspor mulai kembali meningkat.

Dalam rentang lima tahun terakhir, perkembangan komponen ekspor total Jawa Barat memiliki pola yang sama dengan komponen pengeluaran rumah tangga. Pada periode 2018—2019, nilai ekspor total Jawa Barat, baik ke luar negeri maupun ke provinsi lain mengalami peningkatan dari 859.971,31 miliar rupiah menjadi 943.711,91 miliar rupiah. Nilai ekspor total Jawa Barat menurun menjadi sebesar 914.423,48 di tahun 2020. Pada dua tahun berikutnya nilai ekspor total Jawa Barat kembali meningkat, bahkan melebihi nilai sebelum pandemi *Covid-19*, yaitu 1.122.988,05 miliar rupiah di tahun 2021 dan 1.276.342,07 di tahun 2022.

Tabel 18.
Perbandingan PDRB Pengeluaran untuk Konsumsi Akhir
Rumah Tangga terhadap Ekspor, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Konsumsi RT (ADHB) (miliar rp)	1 278 278,90	1 387 762,27	1 378 904,38	1 424 594,08	1 570 458,02
Ekspor Total (ADHB) (miliar rp)	859 971,31	943 711,91	914 423,48	1 122 988,05	1 276 342,07
Perbandingan Konsumsi RT terhadap Ekspor	1,49	1,47	1,51	1,27	1,23

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 18 memberikan tren perbandingan nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai ekspor total. Nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat adalah sebesar 1,49 kali nilai ekspor total pada tahun 2018, dan sedikit menurun menjadi sebesar 1,47 kalinya pada 2019. Di tahun 2020, pembatasan pergerakan manusia akibat pandemi *Covid-19* yang melanda dunia menyebabkan sebagian besar penyediaan (*supply*) barang dan jasa diperuntukkan untuk memenuhi permintaan akhir yaitu konsumsi akhir rumah tangga. Sementara itu kegiatan ekspor menurun akibat lesunya aktivitas produksi dan investasi. Hal itu menyebabkan rasio nilai konsumsi rumah tangga mengalami peningkatan, yakni menjadi sekitar 1,51 kali lipat nilai ekspor total. Pemulihan perekonomian Jawa Barat pasca pandemi *Covid-19* ditandai dengan turunnya rasio konsumsi rumah tangga terhadap ekspor, yaitu menjadi 1,27 di tahun 2021 dan makin menurun menjadi 1,23 di tahun 2022. Hal itu menandakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup besar pada ekspor total Jawa Barat. Dengan kata lain, geliat ekonomi perlahan sudah kembali ke kondisi normal, terlihat pada mulai tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha yang berorientasi ekspor, baik ekspor luar negeri maupun ekspor ke provinsi luar Jawa Barat.

Tren rasio yang makin menurun merupakan indikasi positif bagi perkembangan ekspor Jawa Barat, yaitu perkembangan konsumsi barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan nilai barang dan jasa yang digunakan untuk kegiatan ekspor.

4.3 PERBANDINGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA TERHADAP PMTB

Perbandingan konsumsi akhir rumah tangga dengan PMTB merupakan rasio penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dengan produk yang digunakan untuk investasi fisik (pembentukan modal tetap). Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengamati berapa besar penggunaan produk untuk konsumsi akhir rumah tangga dan investasi fisik. Nilai PMTB diukur dengan total nilai perolehan dikurangi pelepasan aset tetap milik produsen selama periode neraca ditambah pengeluaran atas jasa tertentu yang menambah nilai aset tak diproduksi.

Seperti yang telah diulas pada subbab sebelumnya, pola perkembangan nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 di saat terjadinya pandemi *Covid-19*. Nilai konsumsi rumah tangga kembali meningkat di tahun 2021 dengan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian nilai sebelum terjadinya pandemi. Nilai konsumsi rumah tangga makin meningkat di tahun 2022. Pola serupa pun terjadi pada aktivitas investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Nilai PMTB Jawa Barat di tahun 2018 dan 2019 masing-masing mencapai 495.827,14 miliar rupiah dan 531.364,62 miliar rupiah. Memasuki tahun 2020, nilai PMTB Jawa Barat menurun menjadi sebesar 489.180,23 miliar rupiah. Peningkatan kembali terjadi pada dua tahun berikutnya, yaitu menjadi sebesar 545.297,64 miliar rupiah di tahun 2021 dan sebesar 576.895,25 miliar rupiah di tahun 2022. Dengan membandingkan nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai PMTB secara periodik dapat diperoleh gambaran mengenai dinamika perkembangan penggunaan penyediaan produk untuk memenuhi kedua

komponen pengeluaran tersebut. Rasio yang meningkat bermakna bahwa alokasi penyediaan produk untuk memenuhi konsumsi akhir berupa konsumsi rumah tangga meningkat lebih tinggi dari pada peningkatan alokasi untuk memenuhi kegiatan investasi berupa PMTB.

Tabel 19.
Perbandingan Konsumsi Rumah Tangga terhadap PMTB, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Konsumsi RT (ADHB) (miliar rp)	1 278 278,90	1 387 762,27	1 378 904,38	1 424 594,08	1 570 458,02
Total PMTB (ADHB) (miliar rp)	495 827,14	531 364,62	489 180,23	545 297,64	576 895,25
Perbandingan Konsumsi RT terhadap PMTB	2,58	2,61	2,82	2,61	2,72

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 19 menunjukkan perkembangan rasio nilai konsumsi rumah tangga terhadap nilai PMTB Jawa Barat selama periode lima tahun terakhir. Dalam periode tersebut, terlihat bahwa rasio nilai konsumsi rumah tangga terhadap nilai PMTB cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 rasionya mencapai 2,58 yang bermakna bahwa nilai PDRB yang digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga di tahun 2018 adalah sebanyak 2,58 kali lipat nilai investasi yang dilakukan berupa PMTB. Rasio tersebut meningkat di tahun berikutnya menjadi sebesar 2,61 dan kembali meningkat cukup signifikan di tahun 2020 sebesar 2,82. Pada tahun 2021 yang merupakan tahun pemulihan pasca pandemi, nilai konsumsi rumah tangga Jawa Barat kembali sebesar 2,61 kali lipat nilai PMTB. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh mulai Bergeraknya proyek-proyek investasi yang sempat tertunda baik

di sisi pemerintah, swasta, maupun rumah tangga. Memasuki tahun 2022, rasio nilai konsumsi rumah tangga terhadap nilai PMTB Jawa Barat kembali meningkat menjadi sekitar 2,72. Hal itu menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi rumah tangga lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan komponen PMTB.

4.4 PROPORSI KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Konsumsi akhir merupakan penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir yang berasal dari produksi di wilayah domestik dan dari impor, untuk menunjang aktivitas ekonomi di wilayah domestik. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR), dan pemerintah. Ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, namun sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir. Aktivitas konsumsi akhir tersebut tidak termasuk pengeluaran untuk penambahan aset tetap dalam bentuk tempat tinggal atau barang berharga, karena pengeluaran dengan jenis tersebut digolongkan ke dalam PMTB.

Nilai PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh residen dalam satu wilayah pada suatu periode tertentu. Sedangkan perbandingan konsumsi akhir terhadap PDRB menunjukkan proporsi aktivitas konsumsi pada suatu wilayah. Makin besar nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan makin besar porsi konsumsi akhir di dalam perekonomian suatu wilayah, yang bermakna pula makin besar ketergantungan perekonomian wilayah tersebut terhadap pengeluaran konsumsi akhir. Sebaliknya, makin kecil rasio menunjukkan bahwa porsi aktivitas investasi dan atau ekspor makin besar di wilayah tersebut.

Tabel 20.
Proporsi Total Penggunaan Konsumsi Akhir terhadap PDRB
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Konsumsi Akhir (ADHB) (<i>miliar rp</i>)					
a. Rumah tangga	1 278 278,90	1 387 762,27	1 378 904,38	1 424 594,08	1 570 458,02
b. LNPRT	12 753,65	13 629,89	13 340,95	13 760,94	14 720,00
c. Pemerintah	112 935,06	117 448,94	116 666,16	121 635,31	122 545,78
Jumlah	1 403 967,60	1 518 841,10	1 508 911,49	1 559 990,33	1 707 723,80
PDRB (ADHB) (<i>miliar rp</i>)	1 960 627,65	2 123 153,71	2 082 107,26	2 204 660,23	2 422 782,32
Proporsi (persen)	71,61	71,54	72,47	70,76	70,49

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Tabel 20 menggambarkan proporsi total konsumsi akhir dari rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah terhadap PDRB Provinsi Jawa Barat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Secara rata-rata dalam lima tahun terakhir porsi pengeluaran akhir di dalam PDRB Jawa Barat adalah 71,37 persen, yang memiliki arti bahwa penggunaan konsumsi akhir hampir mencapai duapertiga dari PDRB yang tercipta. Perkembangan porsi konsumsi akhir terhadap PDRB dari tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020. Di tahun 2020 rasio konsumsi akhir mencapai nilai tertinggi yakni sebesar 72,47 persen, sebagai dampak dari tersendatnya aktivitas produktif seperti investasi dan ekspor di masa pandemi. Pasca pandemi, porsi konsumsi akhir di dalam PDRB Jawa Barat cenderung lebih rendah dari pada porsi di masa sebelum pandemi. Di tahun 2018 dan 2019, porsi konsumsi akhir adalah sekitar 71,61 persen dan 71,54 persen. Di masa pemulihan rasio

tersebut mengecil menjadi sebesar 70,76 persen dan makin menurun di 2022 menjadi sekitar 70,49 persen. Tren penurunan tersebut menggambarkan peran aktivitas nonproduktif berupa kegiatan konsumsi di dalam perekonomian Jawa Barat makin kecil, sebaliknya peran aktivitas produktif seperti investasi dan perdagangan dengan luar wilayah baik luar negeri maupun provinsi lain makin membaik. Meningkatnya proporsi PDRB yang digunakan untuk kegiatan produksi memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perekonomian Jawa Barat sebagai provinsi sentra industri dan penyumbang industri Nasional. Di samping itu, Jawa Barat merupakan wilayah dengan nilai realisasi investasi PMA dan PMDN yang cukup besar dibandingkan dengan provinsi lainnya.

4.5 PERBANDINGAN EKSPOR TERHADAP PMTB

Kegiatan ekspor didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi baik atas dasar penjualan/pembelian, barter, hadiah atau hibah atas barang dan jasa antar residen dengan nonresiden yang berada di luar wilayah tersebut, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan kata lain, ekspor merupakan produk yang tidak dikonsumsi di wilayah domestik. Proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang akan diekspor tentu saja melibatkan kapital di wilayah domestik, baik kapital yang berasal dari dalam wilayah tersebut maupun yang berasal dari impor. Di dalam PDRB, pembentukan kapital tercermin di dalam komponen PMTB. Oleh sebab itu, kegiatan ekspor sangat berkaitan dengan kegiatan PMTB.

Rasio nilai ekspor terhadap PMTB memberikan gambaran mengenai seberapa besar perbandingan produksi yang dihasilkan oleh suatu wilayah yang digunakan untuk aktivitas ekspor dengan yang ditujukan untuk aktivitas investasi. Jika ratio bernilai lebih dari 1 (satu), maka hal itu

menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan lebih banyak digunakan untuk kegiatan ekspor daripada digunakan untuk investasi. Demikian pula sebaliknya, jika rasionya lebih kecil dari 1 (satu) maka memberi gambaran bahwa hasil produk wilayah lebih banyak digunakan untuk investasi daripada untuk ekspor.

Tabel 21 menunjukkan bahwa selama periode lima tahun terakhir (2018—2022) rasio ekspor terhadap PMTB bernilai di atas 1, yang bermakna bahwa hasil produksi Jawa Barat yang digunakan untuk ekspor lebih besar dari pada untuk kegiatan investasi fisik. Tren rasio ekspor terhadap PMTB Jawa Barat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu dari sebesar 1,73 pada tahun 2018, meningkat menjadi 1,78 di tahun 2019 dan sebesar 1,87 di tahun 2020. Di dua tahun terakhir bahkan nilainya di atas 2 (dua) yaitu sebesar 2,06 di tahun 2021 dan makin meningkat menjadi sebesar 2,21 di tahun 2022.

Tabel 21.
Rasio Ekspor terhadap PMTB (ADHB) Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ekspor (ADHB) (miliar rp)	859 971,31	943 711,91	914 423,48	1 122 988,05	1 276 342,07
Total PMTB (ADHB) (miliar rp)	495 827,14	531 364,62	489 180,23	545 297,64	576 895,25
Rasio Ekspor terhadap PMTB	1,73	1,78	1,87	2,06	2,21

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Berdasarkan Tabel 21 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandemi *Covid-19* yang terjadi di tahun 2020 tidak menurunkan rasio ekspor terhadap PMTB Jawa Barat. Hal itu memberikan gambaran bahwa penurunan aktivitas ekspor tidak setajam penurunan aktivitas investasi

berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Aktivitas ekspor Jawa Barat masih memberikan respon yang bagus, beberapa komoditas ekspor justru mengalami peningkatan permintaan dari luar Jawa Barat, antara lain barang yang berkaitan dengan kesehatan seperti produk masker dan hasil industri kimia. Adapun penurunan aktivitas PMTB yang cukup tajam di masa pandemi di samping berkaitan dengan kegiatan impor barang modal, juga berkaitan dengan penundaan beberapa proyek strategis berupa proyek-proyek program Nasional seperti Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Sementara itu, di masa pemulihan ekonomi yakni periode 2021—2022, kegiatan perekonomian mulai memberikan respon yang cukup baik terhadap kinerja Ekspor dan PMTB.

Lonjakan kenaikan nilai ekspor menjadi dua kali lipat dari nilai PMTB sangat berkaitan erat dengan Jawa Barat sebagai wilayah dengan kontribusi perekonomian terbesar pada kategori industri pengolahan. Pada masa pandemi *Covid-19*, industri pengolahan yang merupakan lapangan usaha terbesar di Jawa Barat menjadi salah satu yang paling terimbas. Turunnya pertumbuhan lapangan usaha tersebut ini tentunya berdampak pada kinerja ekspor Jawa Barat. Salah satu langkah yang diambil pemerintah agar kinerja industri pengolahan tidak makin terpuruk adalah memberikan insentif pada pelaku industri dengan harapan kinerja ekspor masih dapat berjalan baik dan pengurangan tenaga kerja dapat ditekan seoptimal mungkin. Sementara itu, sisi investasi di masa pandemi *Covid-19* mengalami penurunan yang cukup tajam. Tertundanya beberapa proyek PMA maupun PMDN ditandai dengan turunnya nilai realisasi investasi.

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah berupa serangkaian program pemerintah dalam bentuk paket stimulus fiskal untuk mengurangi dampak *Covid-19*

terhadap perekonomian. Program ini telah diluncurkan oleh Pemerintah sejak 2020 lalu. Program PEN di tahun 2022 dianggarkan sebesar 455,62 triliun rupiah dan hingga akhir tahun 2022 terealisasi sekitar 87 persen dari pagu. Realisasi terbesar PEN 2022 adalah pada kluster pemulihan ekonomi yang dimanfaatkan untuk beberapa program yaitu (1) program padat karya yang ditujukan untuk penyerapan sekitar 540 ribu tenaga kerja; (2) progra, ketahanan pangan berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, serta pembangunan bendungan; (3) program dukungan UMKM yang antara lain berupa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), penjaminan UMKM, dan penjaminan korporasi; dan (4) program insentif usaha/pajak berupa insentif sektor industri terdampak, penurunan tarif PPh Badan, PPnBM DTP kendaraan bermotor, dan PPN DTP perumahan. Semua program kebijakan tersebut diambil dengan harapan akan mendorong pemulihan ekonomi.

4.6 PERBANDINGAN PDRB TERHADAP IMPOR

Rasio ini memberikan gambaran tentang perbandingan antara produk yang dihasilkan di wilayah ekonomi domestik (PDRB) dengan produk yang berasal dari impor, baik berupa barang maupun jasa. Selain itu, rasio perbandingan ini menjelaskan tentang ketergantungan PDRB terhadap produk yang dihasilkan oleh wilayah domestik lain baik luar negeri maupun luar provinsi Jawa Barat. Besar kecilnya ketergantungan ini ditunjukkan melalui rasio, rasio yang kecil menandakan ketergantungan terhadap impor yang makin tinggi, dan sebaliknya rasio yang besar menunjukkan ketergantungan terhadap produk impor tidak terlalu tinggi.

Pada Tabel 22 terlihat bahwa rasio PDRB terhadap impor Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tendensi yang makin menurun. Peningkatan rasio PDRB terhadap impor terjadi di tahun 2020

yakni di masa pandemi *Covid-19* sedang melanda dunia. Pada tahun 2018 dan 2019 rasio PDRB terhadap impor Jawa Barat bernilai hampir sama yakni sebesar 2,25. Rasio tersebut meningkat menjadi sebesar 2,43 pada tahun 2020. Masa pandemi adalah masa anomali di mana beberapa indikator tidak menggambarkan kondisi seperti pada keadaan normal. Seperti halnya rasio PDRB terhadap impor ini, peningkatan rasio di tahun 2020 tidak menggambarkan peningkatan kemampuan Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun penurunan ketergantungan Jawa Barat terhadap impor pada masa itu adalah sebagai akibat dari adanya pembatasan pergerakan manusia termasuk pembatasan aktivitas perdagangan antar negara karena pemberlakuan *lockdown* di sejumlah negara, sehingga pemenuhan permintaan domestik lebih banyak berasal dari produk domestik atau stok dari periode sebelumnya.

Tabel 22.
Rasio PDRB terhadap Impor Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PDRB (ADHB) (miliar rp)	1 960 627,65	2 123 153,71	2 082 107,26	2 204 660,23	2 422 782,32
Impor Total (ADHB) (miliar rp)	871 157,99	944 054,68	857 711,88	1 008 464,59	1 140 671,12
Rasio PDRB terhadap Impor	2,25	2,25	2,43	2,19	2,12

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Memasuki tahun pemulihan ekonomi di mana sudah diberlakukannya pelonggaran pergerakan manusia, rasio PDRB terhadap impor Jawa Barat mengalami penurunan mencapai 2,19 di tahun 2021 dan 2,12 di tahun 2022, atau lebih rendah dari pada rasio sebelum pandemi. Hal

itu menunjukkan pada saat situasi ekonomi mulai kembali normal, ketergantungan Jawa Barat terhadap produk impor, baik berupa impor barang konsumsi, barang modal, maupun berupa jasa, terlihat belum berkurang bahkan cenderung makin meningkat. Penurunan rasio yang secara terus menerus ini menunjukkan meningkatnya ketergantungan wilayah terhadap produk impor yang berdampak terhadap aktivitas produksi domestik. Pemerintah dalam hal ini perlu merumuskan kebijakan untuk memajukan industri pengolahan yang berfokus pada substitusi produk-produk impor.

4.7 KESEIMBANGAN TOTAL PENYEDIAAN DAN TOTAL PERMINTAAN

Total penyediaan adalah jumlah produk yang digunakan dalam kegiatan ekonomi yang berasal dari produksi domestik dan impor, sehingga total penyediaan merupakan penjumlahan output dengan impor. Dengan membandingkan nilai penyediaan domestik dengan permintaan dan nilai impor dengan permintaan, akan diperoleh suatu rasio yang dapat menunjukkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi suatu daerah pada produk yang berasal dari impor. Dengan kata lain, ketergantungan (ketidakseimbangan) tersebut dapat dilihat melalui keseimbangan antara total penyediaan (*supply*) dengan total permintaan akhir (*demand*).

Tabel 23 menunjukkan bahwa pada periode lima tahun terakhir tendensi total permintaan akhir terus meningkat setiap tahunnya, dari sebesar 2.831.785,64 miliar rupiah pada tahun 2018, meningkat menjadi sebesar 3.067.208,39 miliar rupiah di tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020 mengalami sedikit penurunan menjadi sebesar 2.939.819,14 miliar rupiah sebagai dampak dari lesunya ekonomi di masa pandemi *Covid-19*.

Permintaan akhir kembali meningkat seiring dengan meredanya kasus *Covid-19*, yakni menjadi sebesar 3.213.124,83 miliar rupiah di tahun 2021 dan sebesar 3.563.453,44 di tahun 2022. Nilai tersebut sudah lebih tinggi dari pada permintaan akhir di masa sebelum pandemi. Peningkatan permintaan akhir di tahun 2021 dan 2022 sejalan dengan pemulihan ekonomi Jawa Barat di mana konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga nonprofit dan konsumsi pemerintah mengalami peningkatan.

Tabel 23.
Sisi Keseimbangan Penyediaan dan Permintaan
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Total Penyediaan					
PDRB (ADHB) (miliar rp)	1 960 627,65	2 123 153,71	2 082 107,26	2 204 660,23	2 422 782,32
Persentase (persen)	69,24	69,22	70,82	68,61	67,99
Total nilai					
Impor ADHB (miliar rp)	871 157,99	944 054,68	857 711,88	1 008 464,59	1 140 671,12
Persentase (persen)	30,76	30,78	29,18	31,39	32,01
Total					
Permintaan (miliar rp)	2 831 785,64	3 067 208,39	2 939 819,14	3 213 124,83	3 563 453,44
Persentase (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Untuk memenuhi permintaan, sebagian barang dan jasa harus didatangkan dari luar provinsi Jawa Barat, baik dari luar negeri maupun dari luar provinsi Jawa Barat. Dalam periode 2018—2022 tercatat pemenuhan permintaan Jawa Barat yang berasal dari impor berkisar antara 29 sampai dengan 32 persen dari nilai permintaan total. Persentase terendah terjadi pada tahun 2020, yaitu sebesar 29,18 persen. Pandemi *Covid-19* kala itu

berdampak pada turunnya nilai impor barang jasa, yang antara lain disebabkan oleh adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan impor barang. Persentase tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar 32,01 persen. Peningkatan tersebut salah satunya disebabkan oleh mulai meningkatnya jumlah wisatawan Indonesia yang melancong ke luar negeri karena pembatasan kegiatan masyarakat tidak seketat dulu. Hal itu tentu saja memberikan dampak pada peningkatan impor jasa.

4.8 NERACA PERDAGANGAN (*TRADE BALANCE*)

Transaksi devisa yang berasal dari perdagangan barang dan jasa dengan pihak luar negeri maupun luar provinsi Jawa Barat (nonresiden) dapat dilihat melalui neraca perdagangan. Secara konsep, selisih antara nilai ekspor dan nilai impor disebut sebagai ekspor neto. Apabila nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor maka terjadi surplus, dan sebaliknya yang terjadi adalah defisit. Dilihat dari arus uang yang masuk atau keluar, apabila tingkat keseimbangan dalam posisi surplus, maka terjadi aliran devisa masuk, sebaliknya kalau posisinya defisit maka terjadi aliran devisa keluar. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kekuatan ekonomi suatu wilayah di antaranya ditentukan oleh proses tersebut.

Selain gambaran posisi neraca perdagangan, dapat juga dilihat perbandingan (rasio) antara nilai ekspor terhadap impor, meskipun hanya berlaku secara total. Rasio tersebut tidak dapat merefleksikan perbandingan menurut jenis komoditas, harga, maupun kuantum. Apabila rasio lebih besar dari 1 (satu) maka nilai ekspor lebih tinggi daripada nilai impor, sebaliknya apabila rasio kurang dari 1 (satu) berarti nilai impor lebih tinggi daripada

nilai ekspor. Besar kecilnya ekspor atau impor suatu wilayah sangat bergantung kepada kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakatnya.

Tabel 24 menunjukkan neraca perdagangan Jawa Barat periode 2018—2022. Pada tabel tersebut terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, posisi neraca perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Barat dengan luar negeri dan dengan provinsi lain tidak selalu bernilai positif atau selalu bernilai negatif, artinya perdagangan barang dan jasa Provinsi Jawa Barat kadang berada dalam posisi defisit dan kadang dalam posisi surplus. Neraca perdagangan Jawa Barat mengalami defisit pada periode sebelum pandemi *Covid-19*, yaitu sebesar 11.186,68 miliar rupiah di tahun 2018 dan sebesar 342,76 di tahun 2019. Defisit terjadi karena aliran dana yang keluar, baik ke luar negeri dalam bentuk devisa maupun ke luar provinsi, lebih banyak dari pada aliran dana yang masuk ke Provinsi Jawa Barat, yang dalam konteks lain disebut sebagai utang luar wilayah (luar negeri dan luar provinsi).

Tabel 24.
Neraca Perdagangan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

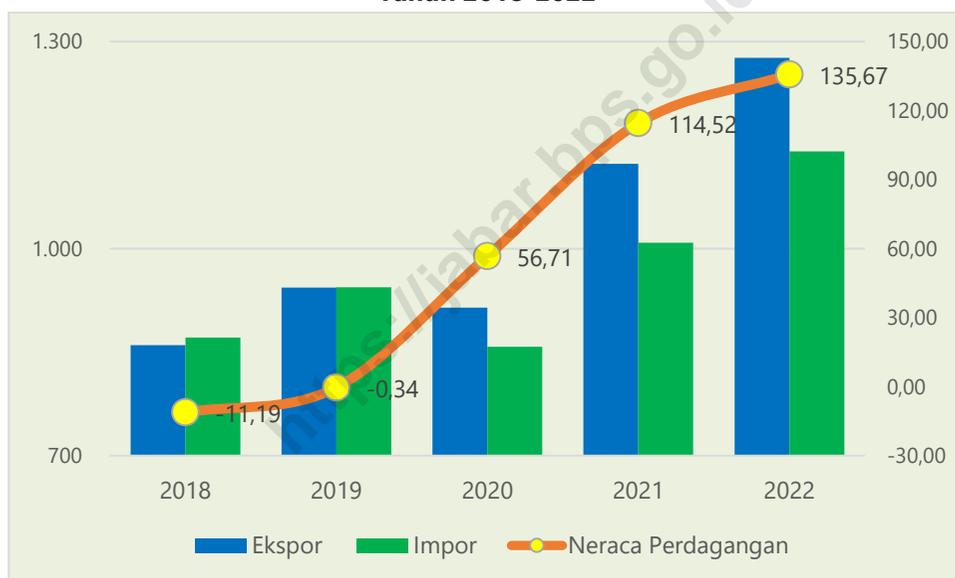
Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Nilai Ekspor (ADHB) (miliar rp)	859 971,31	943 711,91	914 423,48	1 122 988,05	1 276 342,07
Nilai Impor (ADHB) (miliar rp)	871 157,99	944 054,68	857 711,88	1 008 464,59	1 140 671,12
Net Ekspor (X – M) (miliar rp)	-11 186,68	-342,76	56 711,59	114 523,45	135 670,95
Rasio ekspor terhadap Impor	0,987	1,000	1,066	1,114	1,119

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Pada masa pandemi *Covid-19* yang dimulai tahun 2020, posisinya jadi berbalik yaitu terjadi surplus sebesar 56.711,59 miliar rupiah yang

berarti aliran devisa yang masuk lebih besar dari pada aliran devisa yang keluar dari Jawa Barat. Posisi surplus terus berlanjut dalam dua tahun berikutnya yaitu sebesar 114.523,45 miliar rupiah di tahun 2021 dan meningkat menjadi sebesar 135.670,95 miliar rupiah di tahun 2022. Kondisi neraca perdagangan Jawa Barat tersebut secara lebih jelas dapat dilihat pula pada Gambar 2.

Gambar 2.
Nilai Ekspor Impor dan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2022



Selanjutnya, pengamatan terhadap neraca perdagangan dapat dilakukan dengan mengamati nilai rasio ekspor terhadap impor pada setiap tahun. Pada Tabel 24 terlihat bahwa rasio ekspor terhadap impor Jawa Barat mengalami kecenderungan meningkat setiap tahun. Di tahun 2018 rasio yang tercipta masih di bawah angka 1 yaitu sebesar 0,987, yang bermakna bahwa nilai ekspor pada tahun itu lebih rendah dari pada nilai impor. Memasuki tahun 2019, nilai ekspor dan impor Jawa Barat hampir

berimbang, terlihat pada nilai rasio perbandingan keduanya yang sebesar 1,000. Dalam tiga tahun berikutnya, rasio ekspor terhadap impor perlahan meningkat yaitu sebesar 1,066 di tahun 2020, sebesar 1,114 di tahun 2021, dan menjadi sebesar 1,119 di tahun 2022. Dengan kata lain, dalam tiga tahun terakhir nilai ekspor Jawa Barat meningkat jauh lebih cepat dari pada nilai impor. Hal itu tentu saja merupakan capaian positif dalam perputaran perekonomian Jawa Barat.

4.9 RASIO PERDAGANGAN INTERNASIONAL (RPI)

Rasio Perdagangan Internasional (RPI) menunjukkan perbandingan aktivitas perdagangan internasional suatu wilayah, apakah didominasi oleh ekspor atau impor luar negeri (LN). Formulasinya diperoleh dengan menghitung selisih antara ekspor LN dikurangi impor LN dibagi dengan jumlah ekspor LN dan impor LN. Koefisien RPI berkisar antara -1 sampai dengan 1 ($-1 < RPI < 1$). Jika RPI bernilai di antara nol dan minus 1, maka perdagangan internasional didominasi oleh impor, sedangkan apabila berkisar antara nol dan positif 1, maka perdagangan internasional wilayah tersebut didominasi oleh transaksi ekspor.

Tabel 25 menggambarkan perkembangan ekspor dan impor luar negeri Provinsi Jawa Barat periode 2018—2022. Pada periode tersebut, posisi ekspor luar negeri Jawa Barat selalu lebih tinggi dari pada impor luar negeri dengan kecenderungan meningkat setiap tahunnya. Nilai ekspor luar negeri Jawa Barat pada tahun 2018 tercatat sekitar 439.537,88 miliar rupiah, sedikit menurun menjadi sekitar 431.592,57 miliar rupiah di tahun 2019. Penurunan tersebut berlanjut di tahun 2020 dengan capaian nilai ekspor luar negeri sebesar 392.366,18 miliar rupiah. Namun demikian, di masa

pemulihan ekonomi Jawa Barat dari pengaruh pandemi *Covid-19*, yakni tahun 2021 dan 2022, nilai ekspor luar negeri Jawa Barat kembali meningkat menjadi sebesar 488.180,25 miliar rupiah di tahun 2021 dan sebesar 578.508,75 miliar rupiah di tahun 2022. Capaian nilai ekspor luar negeri di dua tahun terakhir bahkan sudah melampaui nilai ekspor luar negeri sebelum masa pandemi.

Tabel 25.
Rasio Perdagangan Internasional Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Nilai Ekspor LN, ADHB (X) (miliar rp)	439 537,88	431 592,57	392 366,18	488 180,25	578 508,75
Nilai Impor LN, ADHB (M) (Miliar rp)	223 561,22	192 372,30	163 821,06	199 808,17	242 816,87
(X – M) (miliar rp)	215 976,66	239 220,27	228 545,12	288 372,08	335 691,88
(X + M) (miliar rp)	663 099,11	623 964,88	556 187,24	687 988,42	821 325,62
R P I	0,33	0,38	0,41	0,42	0,41

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Perkembangan nilai impor luar negeri Jawa Barat memiliki pola yang hampir sama dengan dinamika nilai ekspor luar negerinya dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Nilai impor luar negeri Jawa Barat pada tahun 2018 mencapai 223.561,22 miliar rupiah, kemudian menurun selama dua tahun berturut-turut menjadi sekitar 192.372,30 miliar rupiah di tahun 2019 dan sekitar 163.821,06 miliar rupiah di tahun 2020. Memasuki tahun 2021, nilai impor luar negeri Jawa Barat kembali meningkat seiring dengan makin terbukanya akses perdagangan dengan luar negeri. Di tahun tersebut nilai impor luar negeri Jawa Barat berada pada level 199.808,17 miliar rupiah,

yang di tahun berikutnya yakni 2022 makin meningkat menjadi sebesar 242.816,87 miliar rupiah. Nilai impor di tahun 2022 merupakan yang tertinggi dalam masa lima tahun terakhir.

Dinamika nilai ekspor dan impor luar negeri menghasilkan suatu pola Rasio Perdagangan Internasional (RPI) seperti yang ditunjukkan pada Tabel 25. Selama periode 2018—2022 terlihat bahwa RPI Jawa Barat bernilai positif setiap tahunnya dan memiliki kecenderungan yang selalu meningkat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai RPI yang berada di antara nol dan positif 1 memiliki makna bahwa perdagangan internasional Jawa Barat selama kurun waktu tersebut didominasi oleh kegiatan ekspor. Pada periode lima tahun terakhir, nilai RPI Jawa Barat tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu mencapai 0,42 dan yang terendah terjadi pada tahun 2018 dengan nilai RPI sebesar 0,33. Nilai RPI di tahun 2022 lebih rendah 0,01 poin jika dibandingkan dengan nilai RPI di tahun 2021. Peningkatan nilai RPI mengandung makna bahwa kenaikan nilai impor luar negeri berada di bawah kenaikan nilai ekspor luar negeri, dan sebaliknya penurunan nilai RPI mengandung arti bahwa kenaikan impor luar negeri lebih tinggi dari pada kenaikan nilai ekspor luar negeri.

4.10 INCREMENTAL CAPITAL VALUE ADDED RATIO (ICVAR)

Indikator *Incremental Capital Value Added Ratio* (ICVAR) merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*value added*) dari penggunaan investasi tersebut. ICVAR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan jumlah produksi yang dihasilkan. Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam

proses produksi. Sedangkan nilai tambah dalam hal ini merupakan hasil aktivitas produksi berupa barang dan jasa yang dilakukan oleh residen suatu wilayah pada satu periode. Pendekatan ICVAR dan ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) pada dasarnya sama dalam mengukur besarnya investasi yang terjadi. Dampak penambahan kapital terhadap penambahan *value added* (NTB) diukur menggunakan ICVAR, sedangkan dampak penambahan kapital terhadap penambahan output diukur menggunakan ICOR. Penghitungan nilai ICVAR menggunakan indikator PDRB atas dasar harga konstan (PDRB riil).

ICVAR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap nilai tambah atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai tambah akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula yang digunakan adalah sebagai berikut.

$$ICVAR = \frac{\Delta K}{\Delta VA} = \frac{I}{\Delta VA} = \frac{I_t}{VA_t - VA_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

VA_t = PDRB ADHK tahun ke t

VA_{t-1} = PDRB ADHK tahun ke t-1

Secara teori, ICVAR biasanya bernilai positif. Makin kecil nilai ICVAR mengandung makna bahwa investasi yang dilakukan makin efisien karena makin cepat terjadi penambahan nilai tambah. Sebaliknya makin besar nilai ICVAR menunjukkan investasi yang dilakukan makin tidak efisien karena makin lama penambahan nilai tambah yang diperoleh dari penambahan kapital.

Nilai ICVAR Jawa Barat selama lima tahun terakhir cukup berfluktuatif seperti yang terlihat pada Tabel 26. Pada tahun 2020 ICVAR Jawa Barat bernilai negatif, yaitu sebesar -8,95. Seperti yang telah diulas sebelumnya, tahun 2020 adalah tahun anomali, di mana terjadi kelesuan ekonomi yang ditandai dengan laju pertumbuhan ekonomi yang negatif (kontraksi). Kelesuan ekonomi bukan disebabkan oleh berkurangnya kapital yang terlibat di dalam perputaran ekonomi, namun karena adanya kebijakan pembatasan yang mengakibatkan kegiatan produksi tidak dapat dilakukan sesuai dengan kapasitas produksi kapital yang tersedia. Selain itu, pada kenyataannya penambahan *value added* tidak hanya disebabkan oleh investasi. Dengan terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi (penurunan *value added*), maka penambahan investasi menjadi tidak berarti karena tidak menyebabkan penambahan nilai tambah, sehingga penambahan investasi menjadi tidak efisien.

Tabel 26.
Incremental Capital Value Added Ratio (ICVAR)
Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
PDRB (ADHK 2010) (miliar rp)	1 419 624,14	1 490 959,69	1 453 380,72	1 507 746,39	1 589 984,93
$\Delta(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})$ (Miliar rp)	75 962,00	71 335,55	-37 578,96	54 365,67	82 238,54
PMTB (ADHK 2010) (miliar rp)	352 312,42	366 760,22	336 213,72	357 977,88	359 006,10
ICVAR	4,64	5,14	-8,95	6,58	4,37

Keterangan: *angka sementara **angka sangat sementara

Pada masa sebelum pandemi *Covid-19*, nilai ICVAR Jawa Barat adalah sekitar 4,64 di tahun 2018 dan meningkat sebesar 0,5 poin di tahun 2019 menjadi sekitar 5,14. Sedangkan di masa pemulihan pasca pandemi, nilai ICVAR Jawa Barat masih cukup tinggi, yaitu 6,58 di tahun 2021 dan menurun menjadi sekitar 4,37 di tahun 2022.

Tendensi penurunan nilai ICVAR menunjukkan bahwa investasi makin efisien (Susilowati, dkk. 2012), dan begitu pula sebaliknya. Berdasarkan teori tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan meningkatnya angka ICVAR menunjukkan bahwa investasi di Jawa Barat pada tahun tersebut makin tidak efisien apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak dapat diperlakukan sama pada semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang sifat investasinya cepat dalam menghasilkan nilai tambah akan berbeda dengan lapangan usaha yang sifat investasinya lambat dalam menghasilkan nilai tambah. Atau dengan kata lain, efisiensi investasi lapangan usaha yang berteknologi padat karya akan sangat berbeda dengan efisiensi investasi pada lapangan usaha yang padat kapital.

PDRB

MENURUT PENGELUARAN PROVINSI JAWA BARAT



PDRB 2022

Atas Dasar Harga Berlaku

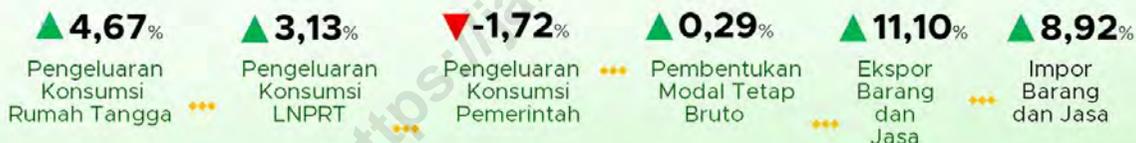
Rp. 2.422,78 Triliun

PDRB 2022

Atas Dasar Harga Konstan 2010

Rp. 1.589,98 Triliun

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat 2022 : 5,45%



PDRB Provinsi Jawa Barat 2017-2021



BAB V

PENUTUP

<https://jabar.bf.go.id>

BAB V

PENUTUP

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan aktivitas perekonomian di tingkat regional (provinsi) pada suatu periode dengan menggunakan pedoman penyusunan yang sama yaitu SNNI 2010, dengan harapan hasil penghitungan PDRB akan konsisten dan memiliki keterbandingan secara wilayah.
2. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018-2022 menggambarkan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi provinsi Jawa Barat pada periode bersangkutan. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
3. Data disajikan dalam bentuk *series* tahun 2018-2022, sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain dan model ekonomi

sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (*industry*), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.

5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor, dan neraca perdagangan. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Provinsi Jawa Barat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).
6. Penyajian Publikasi PDRB Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2022 menggunakan data-data pendukung berupa literatur, data sekunder dari berbagai institusi terkait serta fenomena ekonomi dan sosial dalam lingkup regional, nasional dan global yang relevan dengan data dan informasi yang disajikan.
7. Penyajian Publikasi PDRB Pengeluaran khususnya pada tahun 2022 masih menitikberatkan pada pemulihan ekonomi akibat terdampak Pandemi *Covid-19*. Pemulihan ekonomi ini dapat terlihat dari kinerja ekonomi Jawa Barat pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar 5,45 persen. Menurut komponen pengeluaran, kinerja positif terutama didukung oleh komponen ekspor barang dan jasa yang mengalami pertumbuhan signifikan.

LAMPIRAN

<https://jurnal.bps.go.id>

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (juta rupiah)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	1 278 278 895,69	1 387 762 269,96	1 378 904 384,44	1 424 594 079,36	1 570 458 015,24
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	544 085 381,84	600 969 235,91	618 307 730,62	645 351 211,00	722 110 560,45
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	50 251 880,52	54 850 245,71	52 294 004,24	53 220 934,58	56 014 941,62
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	140 023 541,96	146 390 159,43	147 237 428,46	147 511 895,68	158 992 785,02
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	70 117 779,01	77 629 726,71	81 479 894,36	85 359 925,31	90 498 412,27
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	328 901 488,20	352 325 914,93	324 573 272,42	334 383 985,13	370 990 447,64
1.f. Hotel dan Restoran	77 423 937,73	83 089 604,68	80 914 006,46	82 993 599,86	90 628 409,04
1.g. Lainnya	67 474 886,41	72 507 382,59	74 098 047,87	75 772 527,80	81 222 459,21
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	12 753 645,64	13 629 886,57	13 340 952,35	13 760 940,05	14 720 003,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	112 935 058,42	117 448 944,50	116 666 157,98	121 635 311,82	122 545 780,29
3.a. Konsumsi Kolektif	70 165 686,00	72 707 769,05	69 534 193,00	65 766 733,24	67 222 525,92
3.b. Konsumsi Individu	42 769 372,42	44 741 175,45	47 131 964,98	55 868 578,58	55 323 254,37
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	495 827 138,48	531 364 616,36	489 180 230,19	545 297 644,40	576 895 248,13
4.a. Bangunan	379 900 232,22	415 877 915,49	392 849 743,34	436 960 103,24	452 921 787,92
4.b. NonBangunan	115 926 906,26	115 486 700,87	96 330 486,85	108 337 541,16	123 973 460,21
5. Perubahan Inventori	72 019 599,13	73 290 759,03	27 303 937,79	-15 151 196,70	2 492 323,71
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	439 537 882,91	431 592 571,69	392 366 180,59	488 180 246,18	578 508 751,04
6.a. Barang	432 396 949,44	423 577 374,84	386 395 164,70	483 922 222,18	573 398 186,35
6.b. Jasa	7 140 933,47	8 015 196,86	5 971 015,89	4 258 024,00	5 110 564,69
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	223 561 222,23	192 372 303,93	163 821 055,70	199 808 169,26	242 816 873,81
7.a. Barang	195 293 146,51	159 395 154,36	140 675 501,26	181 634 129,67	218 694 005,44
7.b. Jasa	28 268 075,72	32 977 149,57	23 145 554,44	18 174 039,59	24 122 868,38
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-227 163 345,56	-239 563 032,71	-171 833 530,35	-173 848 622,73	-200 020 927,53
8.a. Ekspor	420 433 422,69	512 119 340,95	522 057 296,17	634 807 801,56	697 833 321,88
8.b. Impor	647 596 768,25	751 682 373,67	693 890 826,52	808 656 424,29	897 854 249,41
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1 960 627 652,47	2 123 153 711,47	2 082 107 257,28	2 204 660 233,11	2 422 782 320,62

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (juta rupiah)**

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	878 991 272,43	920 742 896,72	894 114 734,32	905 974 620,75	948 326 477,59
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	324 630 215,76	345 656 746,37	348 199 607,77	355 651 319,90	371 401 876,27
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	41 077 471,84	42 610 328,80	39 235 874,10	39 451 531,77	40 810 282,34
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	101 695 565,34	103 802 779,70	102 924 782,75	102 116 003,58	106 309 920,78
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	54 709 038,31	57 021 920,61	58 130 996,09	60 816 954,18	62 744 431,16
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	248 119 912,31	258 439 360,21	236 636 286,94	238 521 074,46	253 710 218,97
1.f. Hotel dan Restoran	60 075 801,82	63 114 471,68	60 063 377,21	60 490 275,67	63 522 522,96
1.g. Lainnya	48 683 267,06	50 097 289,35	48 923 809,44	48 927 461,19	49 827 225,12
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	9 032 679,29	9 353 992,20	8 971 941,67	9 144 601,20	9 430 846,38
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	69 973 153,03	72 248 439,95	71 414 931,64	72 890 107,87	71 634 012,87
3.a. Konsumsi Kolektif	43 431 756,21	44 750 436,49	42 580 175,66	39 226 245,19	39 142 070,21
3.b. Konsumsi Individu	26 541 396,82	27 498 003,47	28 834 755,98	33 663 862,68	32 491 942,66
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	352 312 422,29	366 760 224,16	336 213 717,51	357 977 877,04	359 006 097,34
4.a. Bangunan	273 686 085,02	290 449 019,50	273 128 302,27	289 078 286,66	283 279 745,56
4.b. NonBangunan	78 626 337,27	76 311 204,66	63 085 415,24	68 899 590,39	75 726 351,78
5. Perubahan Inventori	43 588 210,21	43 599 928,48	16 198 450,45	-8 456 843,44	1 390 514,71
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	295 786 470,18	289 516 947,79	262 232 452,38	318 560 076,79	358 122 339,01
6.a. Barang	291 604 598,89	284 977 686,59	258 900 026,42	316 221 030,94	355 433 428,95
6.b. Jasa	4 181 871,29	4 539 261,20	3 332 425,96	2 339 045,85	2 688 910,06
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	152 607 775,42	132 534 278,73	115 244 558,07	141 550 806,37	161 580 056,63
7.a. Barang	137 077 712,04	115 082 832,98	102 838 302,29	131 771 792,42	149 303 341,00
7.b. Jasa	15 530 063,38	17 451 445,75	12 406 255,78	9 779 013,94	12 276 715,63
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-77 452 291,97	-78 728 463,48	-20 520 947,06	-6 793 243,70	3 654 695,03
8.a. Ekspor	255 018 780,39	302 168 394,57	296 484 332,33	362 756 134,18	398 786 079,20
8.b. Impor	332 471 072,35	380 896 858,06	317 005 279,38	369 549 377,88	395 131 384,17
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7 + 8)	1 419 624 140,04	1 490 959 687,10	1 453 380 722,84	1 507 746 390,14	1 589 984 926,31

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	65,20	65,36	66,23	64,62	64,82
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	27,75	28,31	29,70	29,27	29,81
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,56	2,58	2,51	2,41	2,31
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,14	6,89	7,07	6,69	6,56
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,58	3,66	3,91	3,87	3,74
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	16,78	16,59	15,59	15,17	15,31
1.f. Hotel dan Restoran	3,95	3,91	3,89	3,76	3,74
1.g. Lainnya	3,44	3,42	3,56	3,44	3,35
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	0,65	0,64	0,64	0,62	0,61
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	5,76	5,53	5,60	5,52	5,06
3.a. Konsumsi Kolektif	3,58	3,42	3,34	2,98	2,77
3.b. Konsumsi Individu	2,18	2,11	2,26	2,53	2,28
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	25,29	25,03	23,49	24,73	23,81
4.a. Bangunan	19,38	19,59	18,87	19,82	18,69
4.b. NonBangunan	5,91	5,44	4,63	4,91	5,12
5. Perubahan Inventori	3,67	3,45	1,31	-0,69	0,10
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	22,42	20,33	18,84	22,14	23,88
6.a. Barang	22,05	19,95	18,56	21,95	23,67
6.b. Jasa	0,36	0,38	0,29	0,19	0,21
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	11,40	9,06	7,87	9,06	10,02
7.a. Barang	9,96	7,51	6,76	8,24	9,03
7.b. Jasa	1,44	1,55	1,11	0,82	1,00
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-11,59	-11,28	-8,25	-7,89	-8,26
8.a. Ekspor	21,44	24,12	25,07	28,79	28,80
8.b. Impor	33,03	35,40	33,33	36,68	37,06
PDRB	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 4. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran, Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)

KOMPONEN PENGLUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	61,92	61,76	61,52	60,09	59,64
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	22,87	23,18	23,96	23,59	23,36
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,89	2,86	2,70	2,62	2,57
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,16	6,96	7,08	6,77	6,69
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,85	3,82	4,00	4,03	3,95
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	17,48	17,33	16,28	15,82	15,96
1.f. Hotel dan Restoran	4,23	4,23	4,13	4,01	4,00
1.g. Lainnya	3,43	3,36	3,37	3,25	3,13
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,64	0,63	0,62	0,61	0,59
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	4,93	4,85	4,91	4,83	4,51
3.a. Konsumsi Kolektif	3,06	3,00	2,93	2,60	2,46
3.b. Konsumsi Individu	1,87	1,84	1,98	2,23	2,04
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	24,82	24,60	23,13	23,74	22,58
4.a. Bangunan	19,28	19,48	18,79	19,17	17,82
4.b. NonBangunan	5,54	5,12	4,34	4,57	4,76
5. Perubahan Inventori	3,07	2,92	1,11	-0,56	0,09
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	20,84	19,42	18,04	21,13	22,52
6.a. Barang	20,54	19,11	17,81	20,97	22,35
6.b. Jasa	0,29	0,30	0,23	0,16	0,17
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	10,75	8,89	7,93	9,39	10,16
7.a. Barang	9,66	7,72	7,08	8,74	9,39
7.b. Jasa	1,09	1,17	0,85	0,65	0,77
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-5,46	-5,28	-1,41	-0,45	0,23
8.a. Ekspor	17,96	20,27	20,40	24,06	25,08
8.b. Impor	23,42	25,55	21,81	24,51	24,85
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	9,31	8,56	-0,64	3,31	10,24
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	11,44	10,45	2,89	4,37	11,89
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	10,16	9,15	-4,66	1,77	5,25
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4,90	4,55	0,58	0,19	7,78
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	8,11	10,71	4,96	4,76	6,02
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	8,26	7,12	-7,88	3,02	10,95
1.f. Hotel dan Restoran	9,90	7,32	-2,62	2,57	9,20
1.g. Lainnya	7,26	7,46	2,19	2,26	7,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	22,04	6,87	-2,12	3,15	6,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	4,63	4,00	-0,67	4,26	0,75
3.a. Konsumsi Kolektif	2,67	3,62	-4,36	-5,42	2,21
3.b. Konsumsi Individu	8,01	4,61	5,34	18,54	-0,98
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	10,35	7,17	-7,94	11,47	5,79
4.a. Bangunan	12,23	9,47	-5,54	11,23	3,65
4.b. NonBangunan	4,58	-0,38	-16,59	12,46	14,43
5. Perubahan Inventori	6,32	1,77	-62,75	-155,49	116,45
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	10,62	-1,81	-9,09	24,42	18,50
6.a. Barang	10,66	-2,04	-8,78	25,24	18,49
6.b. Jasa	7,91	12,24	-25,50	-28,69	20,02
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	12,78	-13,95	-14,84	21,97	21,52
7.a. Barang	13,97	-18,38	-11,74	29,12	20,40
7.b. Jasa	5,17	16,66	-29,81	-21,48	32,73
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	5,25	5,46	-28,27	1,17	15,05
8.a. Ekspor	25,55	21,81	1,94	21,60	9,93
8.b. Impor	17,59	16,07	-7,69	16,54	11,03
PDRB	9,65	8,29	-1,93	5,89	9,89

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	5,03	4,75	-2,89	1,33	4,67
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6,33	6,48	0,74	2,14	4,43
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	4,84	3,73	-7,92	0,55	3,44
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,64	2,07	-0,85	-0,79	4,11
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,10	4,23	1,94	4,62	3,17
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	4,95	4,16	-8,44	0,80	6,37
1.f. Hotel dan Restoran	4,57	5,06	-4,83	0,71	5,01
1.g. Lainnya	3,74	2,90	-2,34	0,01	1,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	15,15	3,56	-4,08	1,92	3,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	1,97	3,25	-1,15	2,07	-1,72
3.a. Konsumsi Kolektif	0,21	3,04	-4,85	-7,88	-0,21
3.b. Konsumsi Individu	4,99	3,60	4,86	16,75	-3,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	5,88	4,10	-8,33	6,47	0,29
4.a. Bangunan	7,48	6,12	-5,96	5,84	-2,01
4.b. NonBangunan	0,66	-2,94	-17,33	9,22	9,91
5. Perubahan Inventori	2,25	0,03	-62,85	-152,21	116,44
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	5,87	-2,12	-9,42	21,48	12,42
6.a. Barang	5,89	-2,27	-9,15	22,14	12,40
6.b. Jasa	4,21	8,55	-26,59	-29,81	14,96
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	1,65	-13,15	-13,05	22,83	14,15
7.a. Barang	1,77	-16,05	-10,64	28,13	13,30
7.b. Jasa	0,54	12,37	-28,91	-21,18	25,54
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	-4,17	-1,65	73,93	66,90	153,80
8.a. Ekspor	18,88	18,49	-1,88	22,35	9,93
8.b. Impor	15,09	14,57	-16,77	16,58	6,92
PDRB	5,65	5,02	-2,52	3,74	5,45

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 7. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	109,31	108,56	99,36	103,31	110,24
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	111,44	110,45	102,89	104,37	111,89
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	110,16	109,15	95,34	101,77	105,25
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	104,90	104,55	100,58	100,19	107,78
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	108,11	110,71	104,96	104,76	106,02
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	108,26	107,12	92,12	103,02	110,95
1.f. Hotel dan Restoran	109,90	107,32	97,38	102,57	109,20
1.g. Lainnya	107,26	107,46	102,19	102,26	107,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	122,04	106,87	97,88	103,15	106,97
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	104,63	104,00	99,33	104,26	100,75
3.a. Konsumsi Kolektif	102,67	103,62	95,64	94,58	102,21
3.b. Konsumsi Individu	108,01	104,61	105,34	118,54	99,02
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	110,35	107,17	92,06	111,47	105,79
4.a. Bangunan	112,23	109,47	94,46	111,23	103,65
4.b. NonBangunan	104,58	99,62	83,41	112,46	114,43
5. Perubahan Inventori	106,32	101,77	37,25	-55,49	-16,45
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	110,62	98,19	90,91	124,42	118,50
6.a. Barang	110,66	97,96	91,22	125,24	118,49
6.b. Jasa	107,91	112,24	74,50	71,31	120,02
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	112,78	86,05	85,16	121,97	121,52
7.a. Barang	113,97	81,62	88,26	129,12	120,40
7.b. Jasa	105,17	116,66	70,19	78,52	132,73
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	105,25	105,46	71,73	101,17	115,05
8.a. Ekspor	125,55	121,81	101,94	121,60	109,93
8.b. Impor	117,59	116,07	92,31	116,54	111,03
PDRB	109,65	108,29	98,07	105,89	109,89

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 8. Indeks Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022

KOMPONEN PENGLUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	105,03	104,75	97,11	101,33	104,67
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	106,33	106,48	100,74	102,14	104,43
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	104,84	103,73	92,08	100,55	103,44
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	102,64	102,07	99,15	99,21	104,11
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	104,10	104,23	101,94	104,62	103,17
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	104,95	104,16	91,56	100,80	106,37
1.f. Hotel dan Restoran	104,57	105,06	95,17	100,71	105,01
1.g. Lainnya	103,74	102,90	97,66	100,01	101,84
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	115,15	103,56	95,92	101,92	103,13
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	101,97	103,25	98,85	102,07	98,28
3.a. Konsumsi Kolektif	100,21	103,04	95,15	92,12	99,79
3.b. Konsumsi Individu	104,99	103,60	104,86	116,75	96,52
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	105,88	104,10	91,67	106,47	100,29
4.a. Bangunan	107,48	106,12	94,04	105,84	97,99
4.b. NonBangunan	100,66	97,06	82,67	109,22	109,91
5. Perubahan Inventori	102,25	100,03	37,15	-52,21	-16,44
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	105,87	97,88	90,58	121,48	112,42
6.a. Barang	105,89	97,73	90,85	122,14	112,40
6.b. Jasa	104,21	108,55	73,41	70,19	114,96
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	101,65	86,85	86,95	122,83	114,15
7.a. Barang	101,77	83,95	89,36	128,13	113,30
7.b. Jasa	100,54	112,37	71,09	78,82	125,54
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	104,17	101,65	26,07	33,10	-53,80
8.a. Ekspor	118,88	118,49	98,12	122,35	109,93
8.b. Impor	115,09	114,57	83,23	116,58	106,92
PDRB	105,65	105,02	97,48	103,74	105,45

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

**Tabel 9. Indeks Perkembangan Implisit Produk Domestik Regional Bruto
(2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022**

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	145,43	150,72	154,22	157,24	165,60
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	167,60	173,86	177,57	181,46	194,43
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	122,33	128,73	133,28	134,90	137,26
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	137,69	141,03	143,05	144,46	149,56
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	128,16	136,14	140,17	140,36	144,23
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	132,56	136,33	137,16	140,19	146,23
1.f. Hotel dan Restoran	128,88	131,65	134,71	137,20	142,67
1.g. Lainnya	138,60	144,73	151,46	154,87	163,01
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	141,19	145,71	148,70	150,48	156,08
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	161,40	162,56	163,36	166,87	171,07
3.a. Konsumsi Kolektif	161,55	162,47	163,30	167,66	171,74
3.b. Konsumsi Individu	161,14	162,71	163,46	165,96	170,27
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	140,74	144,88	145,50	152,33	160,69
4.a. Bangunan	138,81	143,18	143,83	151,16	159,88
4.b. NonBangunan	147,44	151,34	152,70	157,24	163,71
5. Perubahan Inventori	165,23	168,10	168,56	179,16	179,24
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	148,60	149,07	149,63	153,25	161,54
6.a. Barang	148,28	148,64	149,24	153,03	161,32
6.b. Jasa	170,76	176,57	179,18	182,04	190,06
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	146,49	145,15	142,15	141,16	150,28
7.a. Barang	142,47	138,50	136,79	137,84	146,48
7.b. Jasa	182,02	188,97	186,56	185,85	196,49
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	293,29	304,29	837,36	2.559,14	-5.472,99
8.a. Ekspor	164,86	169,48	176,08	175,00	174,99
8.b. Impor	194,78	197,35	218,89	218,82	227,23
PDRB	138,11	142,40	143,26	146,22	152,38

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 10. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Barat, 2018-2022 (persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a s/d 1.g)	4,08	3,64	2,32	1,96	5,32
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,81	3,74	2,13	2,19	7,15
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	5,07	5,22	3,54	1,22	1,75
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,20	2,42	1,44	0,98	3,53
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,85	6,22	2,96	0,14	2,76
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi dan Budaya	3,15	2,84	0,61	2,21	4,31
1.f. Hotel dan Restoran	5,10	2,15	2,33	1,85	3,99
1.g. Lainnya	3,39	4,43	4,65	2,25	5,26
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	5,99	3,20	2,05	1,20	3,72
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (3.a.+3.b.)	2,60	0,72	0,49	2,15	2,52
3.a. Konsumsi Kolektif	2,45	0,57	0,51	2,67	2,43
3.b. Konsumsi Individu	2,88	0,97	0,46	1,53	2,60
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a.+4.b.)	4,22	2,95	0,43	4,69	5,49
4.a. Bangunan	4,42	3,15	0,45	5,09	5,77
4.b. NonBangunan	3,90	2,64	0,90	2,97	4,12
5. Perubahan Inventori	3,98	1,74	0,27	6,29	0,04
6. Ekspor Luar Negeri (6.a.+6.b.)	4,49	0,32	0,37	2,42	5,41
6.a. Barang	4,50	0,24	0,41	2,54	5,42
6.b. Jasa	3,55	3,41	1,47	1,60	4,41
7. Impor Luar Negeri (7.a.+7.b.)	10,95	-0,92	-2,07	-0,70	6,46
7.a. Barang	11,99	-2,78	-1,24	0,77	6,27
7.b. Jasa	4,60	3,81	-1,27	-0,38	5,73
8. Net Ekspor Antar Daerah (8.a.-8.b.)	1,03	3,75	175,18	205,62	-313,86
8.a. Ekspor	5,61	2,80	3,89	-0,62	0,00
8.b. Impor	2,17	1,32	10,92	-0,03	3,84
PDRB	3,78	3,11	0,60	2,07	4,21

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA BARAT
Jl. PHH Mustofa No. 43 Bandung 40124, Jawa Barat
Telp. (022) 7272595; (022) 7201696; Faks.: (022) 7213572
E-Mail : bps3200@bps.go.id
Website : <http://jabar.bps.go.id>

ISSN 2655-0350



9 772655 035003